

Dwi Fitri, M.A
Zakaria, M.M
Suheri Harahap, M.Si

RUANG PUBLIK YANG TERMARGINALKAN



(Analisis Tata Ruang Kota Medan dan Keberadaan Informal Sektor)

UNIMAL PRESS

Supervisor:
Prof. M.Arif Nasution

RUANG PUBLIK YANG TERMARGINALKAN

**(Analisis Tata Ruang Kota Medan dan
Keberadaan Informal Sektor)**



universitas
MALIKUSSALEH

**Dwi Fitri, M.A
Zakaria, M.M
Suheri Harahap, M.Si**

**RUANG PUBLIK YANG
TERMARGINALKAN
(Analisis Tata Ruang Kota Medan dan
Keberadaan Informal Sektor)**

Supervisor:
Prof. M.Arif Nasution

UNIMAL PRESS

Judul: **RUANG PUBLIK YANG TERMARGINALKAN, (Analisis Tata Ruang Kota Medan dan Keberadaan Informal Sektor)**

viii + 100 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: September, 2018

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

Dwi Fitri, M.A

Zakaria, M.M

Suheri Harahap, M.Si

Supervisor:

Prof. M.Arif Nasution

Perancang Sampul dan Penata Letak:

Eriyanto

Pracetak dan Produksi:

Unimal Press

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN:

978 – 602 –464- 085-9

ISBN 978-602-464-085-9



Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Kami bersyukur kepada Allah SWT atas selesainya pembuatan buku “Ruang Publik Yang Termarginalkan “ yang merupakan sebuah karya dari sebuah *Teamwork Project* pada program Pasca Doktor Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara 2017.

Buku ini menggambarkan dilematika ruang publik yang semakin amburadul bahkan nyaris tak bersisa dikarenakan penataan tata ruang kota yang belum maksimal di pemerintahan Kota Medan, Sumatera Utara. Hal ini tentu saja membuat hak-hak publik atas kenyamanan ruang hijau kota tergadaikan. Taman Kota yang dialihfungsikan secara ilegal, masyarakat penjalan kaki yang semakin terpinggirkan karena lahan yang terpakai oleh sektor informal pedagang kaki lima serta trotoar dan saluran yang tertutupi oleh sampah dari para pelaku sektor informal yang kerap sebagai pemicu banjir, merupakan salah satu dari beragam masalah yang muncul akibat tata ruang yang masih sangat perlu diperhatikan.

Terimakasih disampaikan kepada Prof.Dr. H. M. Arif Nasution sebagai supervisor pada *project work* dan para stakeholder penelitian yang telah banyak membantu terselesaikannya tugas ini, serta teman-teman yang telah berkontribusi dalam editing serta seluruh staf pada Pasca Doktor Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak yang membantu terselesainya buku ini. Semoga amalnya di terima Allah sebagai amal jariyah dan buku ini dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Medan, April 2017

Dwi / Zakaria / Suheri .
(*projectwork team*)

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	7
Tujuan Penelitian	8
Manfaat Penelitian	8
BAB II	
METHODE PENELITIAN	
Pendekatan Penelitian	9
Lokasi Penelitian	9
Jenis Data Penelitian	10
Sumber Data Penelitian	10
Teknik Mendapatkan Informan	10
Teknik Pengumpulan Data	11
Instrumen Pengumpulan Data	11
Teknik Analisis Data	12
Keabsahan Data	12
Populasi dan Sampel	12
Studi Pustaka	13
A. Pengertian Sektor informal	13
B. Pengertian Ruang Terbuka	21
BAB III	
MEDAN SELAYANG PANDANG	
A. Sejarah Kota Medan	29
1. Sejarah Awal	29
2. Masa Belanda	31
3. Masa Jepang	34
4. Masa Kemerdekaan	35
5. Masa Tahun 1990-an dan 2000-an	36
B. Visi dan Misi	37
C. Letak Geografis Kota Medan	38
D. Komposisi Penduduk	39
E. Keadaan Ekonomi	43
F. Sekilas Tentang Perkembangan PKL di Kota Medan	46

BAB IV

ANALISA DATA PENELITIAN 51

1. Untuk pertanyaan Typologi dari pemanfaatan Lahan Sektor Informal,..... 53
 - a. Status Lahan Usaha 53
 - b. Peruntukan Lahan Usaha..... 54
 - c. Bentuk Fisik Usaha 54
 - d. Letak Lokasi Usaha..... 55
 - e. Waktu Berjualan..... 56
 - f. Luas Lahan Usaha 56
 - g. Asal Lahan Usaha 57
2. Untuk pertanyaan bagaimana pemanfaatan lahan oleh sektor informal, 58
 - a. Pemanfaatan Lahan Usaha PKL 58
 - b. Omzet Pendapatan Usaha..... 58
 - c. Sales..... 59
3. Untuk Pertanyaan Bagaimana Aktivitas Sektor Informal Dilakukan Di Ruang Terbuka 60
 - a. Modal Perhari 60
 - b. Alasan Berjualan di Ruang Terbuka..... 60
 - c. Jumlah Personil..... 61
 - d. Bahan Dinding Usaha 62
 - e. Atap Usaha..... 62
 - f. Lantai Usaha..... 63
 - g. Jumlah Meja Usaha 64
 - h. Jumlah Kursi Usaha 64
 - i. Sumber Air Usaha 65
 - j. Sumber Listrik Usaha 65
4. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana sektor informal mendapatkan lahan usahanya 66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 95

- A. Kesimpulan..... 95
- B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 97

RIWAYAT PENULIS 99

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di negara- negara berkembang terutama perkotaan, sangat lazim terlihat pekerja- pekerja di tepian jalan dengan beragam unit usaha mulai makanan sampai pada unit usaha jasa, semua pekerja terlihat sibuk menggantung asa pada pekerjaan yang menjadi tulang punggung keluarganya. Unit usaha dari pekerjaan ini berupa warung kecil, jejeran barang, tenda dan gerobak sorong yang mobilitasnya tetap atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Keunikan ini tentu sangat menarik mengingat keberadaan mereka mempermudah konsumen untuk mencukupi kebutuhannya dalam keseharian, karena bisa dijumpai dimana saja ditengah kota.

Unit usaha yang banyak dalam skala kecil ini dikenal dengan sektor informal. Umumnya sektor informal atau biasa dikenal dengan sektor informal merujuk kepada suatu unit usaha kecil yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga, tidak memiliki ketrampilan khusus, teknologi sederhana dan padat karya, unit kerja yang tidak terstruktur dan berpendidikan rendah. Keberadaan sektor informal tidak bisa dipandang sebelah mata, karena selain sebagai *back up* roda perekonomian rakyat yang tidak mampu terserap dengan maksimal oleh negara, sektor informal juga merupakan tulang punggung negara dalam mengurangi kemiskinan sekaligus sebagai sektor pembuka lapangan kerja.

Kecenderungan para pelaku sektor informal adalah mereka yang tidak terserap maksimal oleh peluang kerja yang disediakan oleh pemerintah, mengingat keterbatasan pendidikan, skill dan kompetensi keilmuan. Lebih jauh lagi, sektor informal ini bisa dikatakan sebagai pengentas kemiskinan dan pengangguran, dengan memampukan tenaga kerja berlebih di pedesaan untuk bermigrasi ke perkotaan. Umumnya pelaku sektor informal adalah migran dari desa atau daerah lain.

Sektor informal yang dimaksud adalah pedagang kaki lima. Pelaku unit usaha berskala kecil yang tujuan utamanya hanyalah sekedar untuk bisa memenuhi kebutuhan primer sehari-hari. Sehingga strategi pemasaran mereka hanyalah pada orientasi asal

laku dan memperoleh laba. Sektor informal ini disatu sisi menguntungkan formal sektor lewat subsidi barang dan jasa dengan harga kepada pekerja di formal sektor; pekerja kantoran sipil ataupun swasta.

Keberadaan sektor informal berbeda-beda bila dikaji dari ragam keilmuan. Dilihat dari sisi ekonomi misalnya sektor informal merupakan titik balik positif dalam pergerakan ekonomi rakyat, katup ekonomi negara dalam mengatasi krisis ekonomi atau inflasi negara yang berketerusan. Selain itu juga merupakan katup politik negara dalam menyikapi tuntutan rakyat atas kewajiban negara akan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Jika dilihat munculnya sektor informal dalam teori menurut Emile Durkheim menyatakan faktor penyebab perubahan sosial terjadi karena pembagian kerja dan tipe solidaritas baru. Pembagian kerja berbeda-beda menurut volume dan kepadatan masyarakat, karena jumlah dan tingkat interaksi penduduk meningkat, akan terjadi peningkatan nyata dalam pembagian kerja, pembagian kerja ini selanjutnya lebih mendorong ke arah solidaritas organik ketimbang solidaritas mekanik. (Doyle Paul Johnson, 1988).

Banyaknya sektor informal dalam bentuk penyedia barang; yang dilakukan dengan cara membuka lapak ataupun menjaja dalam kereta dorong, seringkali menjadikan kesemrawutan pada ruang-ruang kota. Jika mereka ini menjajakan secara sembarangan dipinggir jalan, maka yang terjadi adalah kemacetan. Lagi-lagi keadaan ini menyebabkan pemborosan yang besar, baik dilihat dari segi energi dan waktu.

Ketidakteraturan seperti itu tidak hanya menyebabkan kemacetan tetapi juga pemandangan yang tidak baik dan seringkali sektor informal seperti ini menyebabkan kerusakan lingkungan dengan buangnya yang sembarangan. Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu bentuk aktifitas sektor informal ini juga seringkali mengganggu pejalan kaki karena menutupi jalan yang seharusnya dipakai oleh pejalan kaki. Selain berbagai masalah yang dikemukakan diatas, kehadiran sektor informal di perkotaan juga menimbulkan dampak-dampak pada sejumlah hal penting seperti masalah kesehatan kota, kelestarian lingkungan dan persoalan sosial politik.

Namun tidak demikian bila dilihat dari sisi tata ruang kota, dimana ruang terbuka publik telah terkontaminasi oleh keberadaan yang tidak terorganisir sehingga mencela hak-hak warga negara lain dalam penggunaan fasilitas negara berupa ruang publik yang hijau,

nyaman dan aman. Dalam konteks Pembangunan kota, sektor informal cenderung berdampak tidak baik. Ruang terbuka publik menjadi tercemar, ketertiban umum terganggu karena sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini, tentu masyarakat umum dirugikan dengan keberadaannya. Hal lain yang tidak dapat kita pungkiri juga bahwa sektor informal sering menjadi tertuduh sebagai dalang banjir kota. Sanitasi yang tersumbat serta tidak adanya ketertiban dalam pengumpulan sampah menjadi biang utamanya. Pemerintah dengan beberapa kebijakan terlihat pernah mencoba mengatasi problema sosial perkotaan ini melalui relokasi dan penggusuran. Tapi karena kurangnya pengawasan terhadap usaha yang telah dilakukan, hal serupa kembali terulang sehingga untuk mendapatkan kota yang indah menjadi impian masyarakat saat ini.

Banyak kajian tentang sektor informal telah pernah dilakukan, salah satunya tentang strategi penataan sektor informal di Kota Semarang (Brotosunaryo et, al 2013). Penelitian ini menemukan dan mengupas tuntas melalui integrasi pasar tradisional dan pedagang kaki lima, rekolasi dan pengoptimalan lokasi penjualan merupakan metode efektif untuk menata. Umumnya kajian sektor informal hanya menemukan hal yang sifatnya ‘apa’, ‘bagaimana dan dengan cara apa’ tanpa menyentuh pada hal ‘mengapa demikian’ atau dengan kata lain dampak apa yang kemudian dihasilkan melalui sektor informal ini.

Eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) atau disebut juga pedagang informal hingga saat ini sangat dilematis, disatu sisi memiliki kontribusi kesemrawutan wajah perkotaan, tapi disisi lain harus kita akui mampu mendorong perekonomian mikro di perkotaan. Di setiap space (Baca: ruang) yang dianggap strategis maka PKL mulai melakukan aktivitas ekonomi yang diawali satu, dua orang dan akhirnya bertambah banyak. Dan sudah menjadi fenomena keseharian, dengan alasan penataan dan program penilaian adipura komunitas PKL ini sasaran perlakuan yang kurang manusiawi yakni penggusuran. Sebenarnya langkah penggusuran adalah alternatif terakhir, setelah dilakukan beberapa tahapan persuasip yaitu tahapan penataan, pembinaan dan penertiban.

Harus kita pahami bahwa PKL adalah bagian dari masyarakat kota, mereka juga memiliki identitas resmi sebagai penduduk kota. Pemerintah kota harus memberikan legalitas bahwa PKL memiliki hak yang sama dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi ekonomi di perkotaan. Oleh karenanya keberadaan mereka jangan

menjadi penghambat keindahan dan estetika kota, tetapi sebaliknya. Sebagai salah satu alternatif solusi atas keberadaan PKL adalah melakukan penataan dengan kebijakan Pembentukan zoning atau zonasi (Kawasan PKL) yang masuk dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Pemerintah Kota Medan sudah melakukan berbagai alternatif pemecahan dengan jalan menertibkan atau menata aktivitas PKL, termasuk dengan mengembalikan fungsi asli dari kawasan tersebut serta merelokasi para PKL tersebut ke lokasi baru. Namun, pada kenyataannya, setelah pelaksanaan relokasi atau penertiban, PKL kembali beraktivitas ke tempat semula bahkan adakalanya jumlahnya bertambah. Sangat disadari bahwa keberadaan PKL sangat dilematis di wilayah perkotaan. Di satu sisi, PKL sering kali dianggap mengganggu kegiatan sektor lain seperti kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan kota, serta fungsi prasarana dan fasilitas publik sehingga harus ditata, namun di sisi lain, keberadaan PKL sangat membantu mengatasi masalah pengangguran, sumber penerimaan daerah, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat.

Apalagi setelah dikeluarkannya Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menata PKL. Oleh karenanya, diperlukan usaha untuk melindungi para pedagang kaki lima ini sehingga mereka dapat menjalankan usahanya. Salah satu usaha yang harus dilakukan adalah adanya kepastian lokasi berusaha bagi para pedagang kaki lima.

Adapun kebijakan pembangunan tata ruang Indonesia, pembangunan selayaknya dilakukan dengan keselarasan pemanfaatan ruang yang mampu mengembangkan fungsi setiap kawasan. Untuk itu, perlunya disediakan kantong-kantong khusus bagi para pekerja sektor informal dengan tetap mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan dan ketertiban. Selama ini telah ada pembangunan usaha informal tapi tidak memperhatikan aspek-aspek tertentu seperti lokasi yang sulit dijangkau masyarakat sehingga bangunan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya serta infrastruktur yang kurang mendukung pelaku usaha.

Peraturan Pemerintah RI nomor 69 tahun 1996 menjelaskan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang meliputi : *Pertama*, Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan

mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya. *Kedua*, Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. *Ketiga*, Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. *Keempat*, Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. *Kelima*, Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Menurut Erna Witoelar kegiatan penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal.

Menyediakan ruang untuk sektor informal secara cuma-cuma tidak akan menyelesaikan masalah. Karena jika disediakan ruang untuk 100 pelaku sektor informal misalnya, maka akan sangat sulit untuk menahan pelaku yang ke 101 atau 102 untuk tidak juga masuk ke dalam ruang yang disediakan. Cara menata ruang dengan hanya menyediakan ruang tanpa mengorganisasikan pelaku sektor informal sangat tidak disarankan. Menata ruang kota untuk sektor informal sangat penting, namun penataan ini harus pula diikuti dengan pengorganisasian pelaku sektor tersebut untuk kemudian ditempatkan kedalam ruang yang disediakan. Dengan cara seperti ini mereka akan mampu menjaga supaya pelaku baru yang tidak tercatat dan tidak terorganisasi akan masuk dan menambah kepadatan pada ruang yang disediakan.

Namun demikian yang juga sangat penting selain dari menata ruang dan mengorganisasikan pelaku sektor informal adalah menyediakan lapangan pekerjaan di sektor informal. Bagaimanapun, tanpa penyediaan lapangan kerja formal yang cukup, sektor informal ini akan terus ada dan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Dan jika ini terus terjadi, maka seberapapun besarnya ruang kota yang disediakan untuk pelaku sektor informal ini tidak akan pernah cukup. Oleh karenanya diperlukan perencanaan fisik dan non fisik secara terintegrasi.

Pemerintah kota harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan formal yang besar yang dapat menyerap kelebihan angkatan kerja. Pemerintah kota harus memberikan legalitas yang dapat menjadikan PKL memiliki hak yang sama dengan pihak

manapun untuk melakukan transaksi ekonomi di perkotaan. Masyarakat juga masih membutuhkan keberadaan PKL tapi dengan konsep penataan sehingga mampu menjaga keindahan dan estetika kota, bukan sebaliknya. Kebijakan perkotaan terhadap PKL harus diawali dengan adanya keberpihakan pada nasib rakyat kecil dan pengakuan bahwa PKL adalah nafas dari kehidupan perkotaan yang tidak bisa dihilangkan. Realitas ini tentunya harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam alokasi ruang (*public space*).

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota berisi Indikasi Arahan Peraturan Zonasi, Arahan Perizinan, Arahan Insentif dan Disinsentif serta Arahan Sanksi. Dan Pemerintah Kota Medan juga mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tahun 2011 – 2031.

PKL di kota Medan dan juga diberbagai kota di negara berkembang merupakan fenomena keseharian yang bersifat kontroversial. Di satu sisi pemegang otoritas kota sering tidak bersifat ramah pada mereka, bahkan mengusir mereka dari tata ruang kota, tetapi di sisi lain mereka dijadikan sumber pendapatan bagi pemerintah kota melalui pungutan retribusi dan dapat menjadi permasalahan ketenagakerjaan di perkotaan.

Eksistensi sektor informal yang bersifat illegal dan tidak tertata sering dianggap sebagai sumber problema dalam tata ruang kota yang lebih berorientasi pada estetika dan terganggunya ruang gerak publik terutama pejalan kaki. Pemerintah kota Medan mestinya selain menggunakan Perda sebagai payung hukum, perlu juga mendapatkan profil dari informal sektor, sehingga kebijakan yang dijalankan tepat sasaran, untuk itu diperlukan data dan informasi tentang karakteristik informal sektor. Dibutuhkan sebuah konsep dan model penanganan yang benar-benar komprehensif dan menyentuh dasar persoalan yang sebenarnya.

Sektor informal senantiasa tumbuh subur dan memilih lokasi untuk berdagang dengan memanfaatkan ruang terbuka (*public*) yang strategis. Hal tersebut terjadi karena belum terdapatnya aturan tentang wadah yang dapat menampung aktifitas PKL dalam suatu ruang informal di Rencana Tata Ruang Kota (RTRK). Masih banyak para pekerja informal sektor memanfaatkan trotoar, badan jalan dan tempat yang dilarang oleh pemerintah.

Itulah sebabnya pemerintah telah memiliki keabsahan untuk melakukan penertiban dan sebagai usaha untuk mengembalikan

fungsi-fungsi dari fasilitas umum. Adapun alasan pemerintah kota Medan melakukan penertiban pada PKL selain untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan rapi, membangun taman dan sarana dan prasarana olah raga tetapi juga untuk mempertahankan penghargaan kota Adipura yaitu kota yang bersih.

Bagi pemerintah kota Medan, mestinya tidak hanya melihat dampak negatif dari PKL ini saja, tetapi dampak positifnya seperti, PKL menjadi katup pengaman bagi masyarakat perekonomian lemah, PKL menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang relatif murah. Dampak positif PKL dari segi sosial dan ekonomi sangat menguntungkan pertumbuhan ekonomi kota. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh PKL berimplikasi terhadap permasalahan ruang yang harus disediakan oleh kota, karena biasanya PKL menempati lokasi-lokasi yang sudah memiliki fungsi lain dengan kegiatan yang cukup tinggi yaitu area-area strategis perkotaan, sehingga terjadi penurunan kualitas kota.

Berdasarkan dampak yang ditimbulkannya tersebut, sebenarnya dapat dikatakan bahwa eksistensi PKL perlu dipertahankan, hanya saja perlu diupayakan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya sehingga pengelolaan PKL harus direncanakan dengan baik. Di dalam penataan PKL di kota Medan, dipandang perlu untuk dikelola dan ditata sedemikian rupa oleh pemerintah, agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara masyarakat mengenai keberadaan PKL di kota Medan. Dalam hal ini pula penanganan tentang kepastian hukum untuk ruang publik seperti fasilitas-fasilitas umum yang biasanya ditempati oleh PKL agar lebih dijamin oleh pemerintah. Fasilitas umum tersebut, bukan untuk kepentingan individu atau sekelompok orang, akan tetapi untuk keperluan orang banyak. Adapun informasi yang diambil dalam penelitian ini adalah penjelasan yaitu PKL yang berjualan di ruang publik, lingkungan masyarakat dan instansi pemerintah seperti Satpol PP dan Bapeda Kota Medan.

Dari uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini secara komprehensif dengan judul : Implikasi Informal Sektor Terhadap Ruang Terbuka di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Medan).

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Thypologi dari pemanfaatan lahan sektor informal ?

2. Bagaimana Pemanfaatan lahan oleh sektor informal?
3. Bagaimana aktivitas sektor informal dilakukan di ruang terbuka ?
4. Bagaimana sektor informal mendapatkan lahan tersebut ?
5. Bagaimana kontribusi sektor informal terhadap pemerintah kota Medan ?
6. Bagaimana implikasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan tata ruang terbuka kota Medan ?

Tujuan Penelitian

Secara Praktis tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh sektor informal terhadap tata ruang kota
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengelola sektor informal
3. Untuk mengetahui peran sektor informal terhadap nilai ekonomi masyarakat
4. Untuk mengetahui bagaimana cara sektor informal memperoleh lahan usaha
5. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor informal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
6. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Medan dalam mengatur sektor informal terhadap tata ruang perkotaan

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang bisa didapatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi kajian baru dalam memahami keberadaan sektor informal terkait penggunaan ruang terbuka publik yaitu fasilitas umum.
2. Dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial pembangunan dimana objek kajiannya selalu bergerak beragam dan dinamis.
3. Dapat memberikan informasi dan kontribusi terhadap pemerintah Kota Medan.
4. Dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian yang akan datang.

•

BAB II

METHODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penentuan metodologi penelitian yang pada dasarnya adalah “strategi pemecahan masalah” yang mempersoalkan masalah bagaimana permasalahan penelitian tersebut dapat dipecahkan (Faisal, 1989)

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena menurut Kirk dan Miller (Moleong, 2003) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut.

Tipe Penelitian tentang sektor informal perkotaan ini lebih merupakan penelitian yang bersifat analitis, dalam arti penelitian ini tidak berhenti hanya pada tahap mendistribusikan data, fakta dan temuan lapangan, tetapi dalam pelaksanaannya dikembangkan dengan memberikan penafsiran yang memadai atas dasar hasil analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Oleh karena itu penelitian ini dalam usaha memecahkan masalah, tahapan dan proses analisis dilakukan dengan membandingkan persamaan atau perbedaangejala atau fakta, menilai fakta, mengukur dimensi, mengadakan klarifikasi, menetapkan standar sehingga diperoleh suatu penafsiran yang rasional (Nawawi, 2001).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam arti tidak bermaksud menguji hipotesis, tetapi bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial dengan member bobot yang tinggi dengan mengembangkan analisis dari penafsiran yang rasional sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terhadap Pedagang Sektor Informal sub sektor Kuliner, mengambil data dari 70 (tujuh puluh) sample pedagang Kaki Lima yang tersebar di tujuh Kecamatan di wilayah Kota Medan, yang meliputi Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal dan

Kecamatan Medan Tuntungan yang meliputi 14 Kelurahan yakni Asam Kumbang, Babura, Dwikora, Helvetia Tengah, Padang Bulan, PB. Selayang, Sei Agul, Sei Kambing, Sei Sikambing, Sunggal, Sunggal Kanan, Tanjung Rejo, Tanjung Sari dan Tanjung Selamat yang dilakukan selama kurun waktu 2 (dua) Minggu, dimulai dari tanggal 11 November 2016 dan berakhir tanggal 25 November 2016.

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi studi adalah :

- Kota Medan dikenal sebagai kawasan yang masyarakatnya bersifat heterogen dan dalam beberapa dekade ini telah berkembang menjadi bagian integral dan sub-sistem perkotaan.
- Populasi sektor informal (perkotaan) yang cukup banyak yang mengelilingi kawasan ini, sehingga mendukung pelaksanaan penelitian dengan tersedianya obyek dan subyek yang akan memudahkan pengumpulan data.

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah bersifat skematik, narasi dan uraian penjelasan data dari informan baik lisan maupun data dokumen yang tertulis, perilaku subyek yang diamati di lapangan juga menjadi data dalam pengumpulan hasil penelitian ini.

Sumber Data Penelitian

Adapun obyek penelitian dalam studi ini adalah sektor informal perkotaan yang dibatasi hanya mereka para pedagang kaki lima (PKL) dengan jenis usaha kuliner yang beroperasi di kota Medan. Untuk dapat mendiskripsikan profil subyek penelitian secara detail dan menyeluruh (komprehensif) sehingga memudahkan dalam menganalisis dan memberikan penafsiran maka selain aktivitas dari subyek penelitian juga dikumpulkan data dari beberapa informan yang dianggap mengetahui banyak tentang subyek yang diteliti.

Teknik Mendapatkan Informan

Adapun teknik-teknik yang dipergunakan peneliti dalam mendapatkan informan dalam proses penelitian ini dengan *Purpose sampling*

Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan permasalahan, teknik pengumpulan data dilakukan meliputi :

- 1) Observasi atau Pengamatan Lapangan, baik terhadap subyek penelitian, lingkungan usaha, tempat tinggal dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Juga mengamati dan mengumpulkan data yang relevan berkenaan dengan subyek penelitian.
- 2) Wawancara dan Penyebaran Questioner, dalam hal melihat lebih dalam permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan teknik wawancara langsung dengan subyek penelitian sebagai responden dan sebagian dilakukan dengan memberikan questioner untuk diisi dan dikembalikan di lain kesempatan. Dalam penelitian ini, wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2004) wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal yang memiliki tujuan dan karakteristik yang khas, dengan kata lain wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilaksanakan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- 3) Studi Literatur dan Hasil Penelitian sebelumnya yang relevan, dilakukan untuk lebih mendukung dan menganalisis dan memberikan interpretasi sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan rekomendasi yang lebih akurat untuk mencari solusi permasalahan penelitian.

Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan pendekatan akan terjun langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data baik melakukan observasi, interview, wawancara dan studi literatur selama jangka waktu tertentu sampai data yang dikumpulkan dianggap cukup. Selain itu instrument yang dimaksud adalah proses penelitian yang dimulai dari memilih topik penelitian, pendekatan penelitian, pengumpulan data, proses analisis, hingga menginterpretasikan temuan-temuan lapangan yang dihasilkan. Beberapa instrument yang termasuk instrument pendukung adalah Questioner untuk responden, Panduan untuk wawancara dengan

informan, Catatan Lapangan hasil dari observasi, Catatan hasil wawancara mendalam dan Alat tulis, kamera, alat rekam dan perbekalan lain untuk memperlancar hubungan dan komunikasi dengan informan serta responden.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2005) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Neumann. Menurut Neumann (2003), analisis penelitian kualitatif bersifat induktif; bergerak dari hal yang spesifik ke hal yang lebih umum. Artinya, penelitian ini dimulai atau bertolak dari data-data yang berhasil dikumpulkan untuk membangun konsep atau teori. Analisis induktif pada penelitian kualitatif dapat digunakan untuk melihat pola atau hubungan dari data yang dikumpulkan, namun demikian analisis kualitatif ini tidak dapat menggambarkan secara luas berdasarkan data statistik dan matematika.

Keabsahan Data

Menurut Irawan (2000) dalam penelitian kualitatif terdapat standar khusus yang perlu dipenuhi sehingga sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif itu sendiri. Setidaknya terdapat empat standar atau criteria utama yang dapat menjamin kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, yaitu :

- a. Kredibilitas
- b. Transferabilitas
- c. Depenabilitas
- d. Konfirmabilitas

Populasi dan Sampel.

Populasi

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan (Hikmat,2011:60). Sesuai dengan tujuan penelitian, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh para pedagang kaki lima yang menggunakan ruang publik terbuka atau fasilitas umum terbuka di Kota Medan.

Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang tersedia. Penelitian ini menggunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan maksud agar sampelnya representatif atau mewakili ciri-ciri populasi secara keseluruhan. Mengingat kecenderungan homogenitas dari para pedagang kaki lima, maka tahap awal dipilih tiga daerah kecamatan yang mewakili daerah tengah kota dan pinggiran kota. Berdasarkan kriteria itu diperoleh 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Marelán, Sunggal dan Medan Baru.

Tahap kedua adalah menentukan kriteria sektor informal yang menjadi tujuan penelitian secara purposive. Kriterianya adalah para pedagang kaki lima yang unit usahanya berada di darat, memiliki tempat usaha yang bersifat permanen dan minimal sudah beroperasi di tempat tersebut kurang lebih enam bulan lamanya.

Tahap ketiga adalah menentukan jumlah responden. Sampel responden ditetapkan mengikuti pendapat Roscoe (Sugiyono, 2013) yang menyatakan berapapun jumlah populasinya, dalam penelitian sosial ukuran sampel yang layak digunakan antara 30 sampai dengan 500 orang. Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menetapkan masing-masing Kecamatan diwakili sekitar 30 orang para pedagang kaki lima, sehingga penetapan anggota sampel sebanyak 90-100 orang dianggap telah representatif.

Studi Pustaka

A. Pengertian Sektor informal

Konsep sektor informal pertama kali di pergunakan oleh Keith Hart dari University of Manchester pada tahun 1973 yang menggambarkan bahwa sektor informal adalah bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. (Nurul, 2009). Kemudian konsep sektor informal di kembangkan oleh ILO dalam berbagai penelitian di Dunia Ketiga. Konsep itu digunakan sebagai salah satu alternatif dalam menangani masalah kemiskinan di Dunia Ketiga dalam hubungannya dengan pengangguran, migrasi dan urbanisasi. Manning dan Effendi, (1996) mengemukakan bahwa Keith Hart seorang antropolog Inggris adalah orang pertama kali melontarkan gagasan sektor informal dalam penelitiannya di suatu kota di Ghana pada tahun 1973.

Breman (dalam Manning, 1991) menyatakan bahwa sektor informal meliputi massa pekerja kaum miskin yang tingkat produktifitasnya jauh lebih rendah dari pada pekerja di sektor modern di kota yang tertutup bagi kaum miskin. Sedangkan menurut

Hidayat (1978), sektor informal adalah lawan dari formal sektor yang yang diartikan sebagai suatu sektor yang terdiri dari unit usaha yang telah memperoleh proteksi ekonomi di pemerintah, sedangkan sektor informal adalah unit usaha yang tidak memperoleh proteksi ekonomi dari pemerintah.

Mengenai struktur informal ini Breman (dalam Manning, 1991) menambahkan bahwa sektor informal merupakan suatu istilah yang mencakup dalam istilah “usaha sendiri”, merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, sulit di cacah, sering dilupakan dalam sensus resmi, persyaratan kerjanya jarang dijangkau oleh aturanaturan hukum. Mereka adalah kumpulan pedagang, pekerja yang tidak terikat dan tidak terampil, serta golongan-golongan lain dengan pendapatan rendah dan tidak tetap, hidupnya serba susah dan semi kriminal dalam batas-batas perekonomian kota.

Menurut Sthurman dalam Manning dan Tajuddin (1989) mengemukakan sektor informal biasanya digunakan untuk mengajukan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Alasan berskala kecil karena : umumnya mereka berasal dari kalangan miskin, sebagai suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara berkembang, bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan untuk memperoleh keuntungan, umumnya mereka berpendidikan sangat rendah, mempunyai keterampilan rendah dan umumnya dilakukan oleh para migran.

Castell dan Portas (Portas, 1989) mengajukan definisi sektor informal sebagai proses perolehan penghasilan di luar sistem regulasi. Istilah ini merupakan suatu ide akal sehat (*common sense nation*) yang karena batas-batas sosialnya terus bergeser, tidak dapat dipahami dengan definisi yang ketat. Mereka melihat bahwa sektor informal sebagai suatu proses perolehan penghasilan mempunyai cirri-ciri sentral yang tidak diatur oleh lembaga-lembaga sosial dalam suatu lingkungan legal dan sosial. Menurut mereka batas-batas ekonomi informasi bervariasi secara substansial sesuai dengan konteks dan kondisi historisnya masing-masing.

Dipak Muzandar dalam Manning dan Noer (1989) memberikan definisi sektor informal sebagai pasaran tenaga kerja yang tidak dilindungi. Dikatakannya bahwa salah satu aspek penting dari perbedaan antara sektor informal dan formal sector sering dipengaruhi oleh jam kerja yang tidak tetap dalam jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya hubungan kontrak

kerja jangka panjang dalam sektor informal dan upah cenderung dihitung per hari atau per jam serta menonjolnya usaha sendiri.

a.1. Ciri-Ciri Sektor informal

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Hidayah (dalam Dahriani, 1995) yang mengemukakan beberapa faktor pelengkap dari ciri-ciri sektor informal tersebut, yaitu:

"faktor pelengkap tersebut adalah modal sukar diperoleh; kredit bila tersedia terutama dari lembaga keuangan tidak resmi. Selain itu, tidak ada peranan serikat buruh (trade union), hubungan kerja berdasarkan saling mempercayai antar majikan dan karyawan/pekerja, hasil produksi tersedia dalam persediaan terbatas serta mulut berbeda-beda dan tidak ada atau hanya sedikit diperoleh bantuan pemerintah"

Sedangkan menurut Wirosardjono (1985) sektor informal mempunyai ciri-ciri adalah : pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam waktu, permodalan maupun permintaan, tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kegiatannya bisa sering dikatakan liar, modal, peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian, tidak mempunyai keterikatan dengan usaha besar, umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapat rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja, umumnya tiap suatu usaha memperkerjakan tenaga sedikit dan dari hubungan keluarga, kenalan, atau berasal dari daerah yang sama, tidak mengenal suatu perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya.

Urip Soewarno dan Hidayat mengemukakan 10 ciri dari sektor informal yang garis besarnya hampir sama seperti yang dikemukakan oleh Wirosarjono. Kesebelas ciri tersebut adalah:

1. Aktifitas pada sektor ini tidak terorganisir secara baik karena tidak melalui institusi yang ada.
2. Kebijaksanaan pemerintah tidak sampai pada sektor ini, maka sektor informal tidak mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah.
3. Pada umumnya setiap unit usaha tidak mempunyai izin usaha dari pemerintah.
4. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam arti tempat ataupun jam kerja.

5. Unit usaha pada sektor ini mudah keluar masuk dan masuk dari sub sektor ke lain sub sektor.
6. Teknologi yang digunakan termasuk ke dalam teknologi yang sederhana, modal dan perpustakaan usaha relatif kecil, maka skala operasi unit usaha ini kecil pula.
7. Skala operasinya kecil dan tingkat teknologinya sangat sederhana, maka untuk mengelola usaha tidak diperlukan tingkat pendidikan tertentu. bahkan keahliannya didapat dari sistem pendidikan non formal dan pengalaman.
8. Kebanyakan unit usaha ini termasuk dalam one-man enterprise atau kalau mempunyai buruh, maka buruh tersebut berasal dari lingkungan keluarganya dan unit tersebut dinamakan family enterprise.
9. Sumber dana untuk modal tetap atau modal kerja kebanyakan berasal dari tabungan sendiri dan dari sumber keuangan tidak resmi.
10. Hasil produksi dan jasa di sektor ini dikonsumsi oleh golongan berpenghasilan rendah dan kadang-kadang oleh golongan menengah ke atas (Urip, 1978).

Becker (2004) menyebutkan bahwa di Asia jenis pertama ini dapat mencapai 60% dari total orang yang beraktivitas dalam sektor informal. *In Asia self-employment covers around 60 percent of the total informal sector* (Becker, 2004). Sedangkan Scheider (2002) menyebutkan kegiatan sektor informal sebagai pekerjaan penuh waktu setelah bekerja, bagi kaum migran lebih mudah didapatkan karena mereka tidak diperkenankan bekerja pada sektor formal : *Informal activities take place in many forms. The work varies from part-time jobs after working hours, to work of immigrants who are not allowed to work in the formal sector. In general, informal activities can be categorized into two sections: self-employed and non-permanent labor. In all developing countries the self employed.*

Istilah pedagang kaki lima (PKL) sebenarnya telah ada dari jaman Raffles yaitu berasal dari istilah 5 feet yang berarti jalur dipinggir jalan selebar lima kaki. Di Amerika, pedagang semacam ini disebut dengan Hawkers yang memiliki pengertian orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di tempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar (McGee dan Yeung ; Surya,2006).

Memakai konsep informalitas perkotaan dalam mencermati fenomena PKL di perkotaan mengubah perspektif terhadap

keberadaan mereka di perkotaan. PKL bukanlah kelompok yang gagal masuk dalam sistem ekonomi perkotaan. PKL bukanlah komponen ekonomi perkotaan yang menjadi beban bagi perkembangan perkotaan, PKL adalah salah satu modal dalam transformasi perkotaan yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi perkotaan. Masalah yang muncul berkenaan dengan PKL ini adalah banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL di perkotaan. Konsep perencanaan ruang perkotaan yang tidak disadari oleh pemahaman informalitas sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk informal sektor termasuk PKL (Rukmana,2005).

a.2. Karakteristik PKL

Menurut Herlianto, 1986 , salah satu karakteristik sektor informal yaitu kecenderungan memakai sumber daya lokal serta tidak memiliki izin resmi sehingga sektor informal sangat bervariasi jenis atau unit usahanya seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang eceran, tukang warung, tukang cukur, tukang becak, tukang sepatu, tukang loak, buruh harian, serta usaha- usaha rumah tangga seperti pembuat tempe, tukang jahit, tukang tenun dan lain-lain.

Simanjuntak (1989) menjabarkan karakteristik PKL sebagai berikut :

1. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
2. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
3. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

Dari segi sarana fisik dan pola pelayanan, karakteristik PKL yaitu sebagai berikut:

a. Sarana Fisik Berdagang PKL

Menurut McGee da Yeung (Surya, 2006) bahwa di kota-kota Asia Tenggara mempunyai bentuk dan sarana fisik dagangan PKL umumnya sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah-pindah atau mudah dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya.

1. Jenis Dagangan

Jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana PKL tersebut beraktivitas. Sebagai contoh di kawasan perdagangan, maka jenis dagangannya

beraneka ragam seperti makanan atau minuman, kelontong dan lainnya. Beberapa jenis PKL dibagi sebagai berikut :

- a) Bahan mentah makanan dan makanan setengah jadi (*unprocessed and semiprocessed foods*). Kategori jenis makanan ini seperti daging, buah dan sayuran. Beras juga merupakan salah satunya
- b) Makanan siap saji (*prepared Food*.) Termasuk jenis barang dagangan berupa makanan dan minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan di tempat maupun dibawa pulang.
- c) Non Makanan (*non Food*). Termasuk jenis barang dagangan ini yang tidak berupa makanan, contohnya adalah mulai dari tekstil sampai obat-obatan.
- d) Jasa Pelayanan (*services*). Jasa Pelayanan yang diperdagangkan adalah jasa perorangan, seperti tukang membuat kunci, reparasi jam dan sebagainya.

2. Sarana Usaha

PKL merupakan usaha yang memakai sarana yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan. Berdasarkan pengertian tersebut, berarti bentuk fisik PKL bukan merupakan bangunan permanen tetapi adalah bangunan yang mudah dipindahkan atau di bongkar pasang. Waworoentoe (Widjajanti,2000) PKL dpt dikategorikan dalam:

- 1) Kios
Pedagang jenis ini adalah pedagang menetap, karena secara fisik tidak dapat dipindahkan. Biasanya merupakan bangunan semi permanen yang terbuat dari papan.
- 2) Warung semi permanen
Terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja dan bangku panjang. Sarana ini beratap bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL seperti ini adalah jenis tetap dan cenderung berjualan makanan dan minuman.
- 3) Gerobak / Kereta Dorong
Sarana berdagang ini ada 2 jenis yaitu gerobak/ kereta dorong yang beratap sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari panas, hujan, dan debu serta yang tidak beratap. Biasanya jenis ini adalah mereka yang menetap dan tidak menetap dan berjualan makanan, minuman dan rokok.

- 4) Jongkok / Meja
Bentuk Sarana berdagang jenis ini bisa beratap bisa juga tidak. Sarana ini dikategorikan jenis PKL menetap.
- 5) Gelaran / Alas
Pedagang menjajakan dagangannya diatas tikar, kain dan sejenisnya.
- 6) Pikulan/ Keranjang
Sarana ini digunakan oleh para pedagang yang keliling atau semi menetap dengan menggunakan satu atau dua buah keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.

b. Pola Pelayanan Kegiatan PKL

Manurut Hanarti (1999), pengelompokan aktivitas perdagangan sektor informal berdasarkan pola pelayananan kegiatannya dikategorikan atas fungsi pelayanan, golongan pengguna jasa, skala pelayanan dan waktu pelayanan. Selanjutnya pengkategorian dapat dipaparkan berikut ini :

1. Fungsi Pelayanan
Penentuan jenis fungsi layanan dari suatu aktivitas PKL bisa ditentukan dari dominasi kuantitatif jenis barang dan jasa yang diperdagangkannya. Suatu lokasi aktivitas PKL dapat memiliki lebih dari satu fungsi secara sekaligus. Ada tiga fungsi dan peran PKL dalam kehidupan perkotaan:
 - a) Fungsi Pelayanan perdagangan dan jasa
 - b) Fungsi Pelayanan Rekreasi
 - c) Fungsi Pelayanan Sosial Ekonomi
2. Golongan Pengguna Jasa
Golongan pengguna jasa PKL umumnya berada dari kalangan menengah ke bawah. Hal ini dapat teridentifikasi lewat harga yang ditawarkan, relatif murah dan mampu menjangkau kalangan bawah.
3. Skala Pelayanan
Besarnya kecilnya skala pelayanan tergantung dari jauh dekatnya asal penggunanya. Semakin dekat asal penggunannya maka skala pelayanan semakin kecil, sebaliknya semakin jauh asal penggunannya maka skala pelayanannya semakin besar.

4. Waktu Pelayanan

Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pada perilaku kegiatan formal atau kondisi yang ada. Saat teramai pada suatu waktu pelayanan dipengaruhi oleh orientasi aktivitas jasa tersebut terhadap pusat kegiatan disekitarnya.

5. Sifat Layanan

Pedagang Sektor informal berdasar sifat layanannya dibedakan atas 3 yaitu :

a. Pedagang Menetap (*static hawkers units*)

Suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dimana pembeli mendatang sendiri ke tempat pedagang itu berada.

b. Pedagang semi menetap (*semistatic hawkers units*)

Suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat tertentu saja dengan jangka waktu lama (ada batas waktu tertentu).

c. Pedagang Keliling (*mobile hawkers units*)

Pedagang keliling adalah suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat untuk selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen dengan bergerak atau berpindah-pindah tempat. (McGee and Yeung; Surya,2006).

a.3 Regulasi PKL

Di Indonesia, Pada dasarnya strategi pemberdayaan pada pedagang ekonomi lemah pada sektor informal terutama PKL dimulai dari platform filosofis konstitusional yang tercermin dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan didukung dengan hasil perubahan kedua Undang-undang Dasar pada Tahun 2000 yang terdapat pada Pasal 28 H UUD 1945. Selanjutnya hak dari warga Negara juga sudah diatur dalam ketentuan Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan 34 UUD 1945.

(Soehino, 1974) menjelaskan bahwa jaminan terhadap warga Negara tersebut dapat berupa : adanya kepastian hukum, hak atas ganti rugi, hak mengajukan gugat atau banding, baik kepada alat-alat perlengkapan administrasi Negara maupun kepada pengadilan, hak mengajukan keberatan sebelum diambil keputusan oleh yang berwenang, penggunaan wewenang oleh alat-alat perlengkapan administrasi Negara sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya oleh aturan-aturan hukum.

Hal ini tercermin dalam Pasal 4, 5, 6, 7 ayat (1) dan Pasal 8 TAP MPR No. XVI/MPR/1998 yang memfasilitasi sektor ekonomi lemah termasuk usaha kecil untuk berkembang, mengingat para PKL sebagai warga Negara perlu diberikan jaminan terhadap hak-haknya, terlebih dalam negara hukum. Lahirnya TAP MPR ini bertujuan untuk memperkuat keberadaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan memberikan peluang untuk memberdayakan dan mengangkat harkat hidup para PKL pada sektor informal.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan usaha kecil meliputi usaha kecil informal yang di dalamnya sudah termasuk PKL. Selanjutnya Penjelasan Pasal 13 huruf a ditekankan mengenai menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan mencakup aspek peruntukan tempat usaha, antara lain : angka (6) menyatakan, bahwa lokasi untuk PKL diatur melalui penetapan tata ruang. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 telah mengatur bahwa penataan ruang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan ruang secara makro yang bertujuan : *Pertama*, terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ketahanan Nasional. *Kedua*, Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. *Ketiga*, tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, salah satunya adalah untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

B. Pengertian Ruang Terbuka

Ruang (terbuka) kota yang diberi status ruang publik menurut Hasti Hariati Indra (2008) termasuk sebagai benda konsumsi kolektif. Artinya, masyarakat harus berbagi dalam pemanfaatannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta dalam studi tahun 2006 mengklasifikasikan ruang publik dalam dua bentuk; linear dan non-linear. Jalan umum adalah contoh ruang linear. Alun-alun adalah contoh ruang non-linear. Selain itu, ruang publik ada yang secara fisik terbuka dan tertutup (dalam ruang beratap).

Sedangkan ruang publik yang dimaksud secara umum pada sebuah kota, menurut *Project for Public Spaces in New York* tahun 1984, adalah bentuk ruang yang digunakan manusia secara bersama-sama berupa jalan, pedestrian, taman-taman, plaza, fasilitas

transportasi umum (halte) dan museum. Pada umumnya ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk saling berinteraksi. Karena pada ruang ini seringkali timbul berbagai kegiatan bersama, maka ruang-ruang terbuka ini dikategorikan sebagai ruang umum.

Sedangkan menurut Roger Scurton (1984) setiap ruang publik memiliki makna sebagai berikut: sebuah lokasi yang didesain seminimal apapun, memiliki akses yang besar terhadap lingkungan sekitar, tempat bertemunya manusia/pengguna ruang publik dan perilaku masyarakat pengguna ruang publik satu sama lain mengikuti norma-norma yang berlaku setempat. Meskipun sebagian ahli mengatakan umumnya ruang publik adalah ruang terbuka, Rustam Hakim (1987) mengatakan bahwa, ruang umum pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun secara kelompok, dimana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan.

Menurut sifatnya, ruang publik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu : *Pertama*, ruang publik tertutup : adalah ruang publik yang terdapat di dalam suatu bangunan. *Kedua*, ruang publik terbuka : yaitu ruang publik yang berada di luar bangunan yang sering juga disebut ruang terbuka (*open space*). Menurut Zoer'aini (1997) tujuan umum pembangunan suatu kota adalah untuk pertahanan hidup manusia yang terdiri atas dua aspek yaitu tetap hidup dan mempertinggi nilai hidup.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pembangunan kota mempunyai fungsi dan tujuan sebagai berikut: Kehadiran sebuah kota memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya agar dapat bertahan dan melanjutkan hidup, serta meningkatkan kualitas kehidupan. Komponen-komponen kota adalah penduduk, pemerintah, pembangunan fisik, sumberdaya alam dan fungsi. Penduduk kota meliputi jumlah (dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, migrasi), dan kecenderungan penyebaran (umur, jenis kelamin, etnik, sosial ekonomi, agama dan lainnya).

Pentingnya kehadiran flora dan fauna. Pembangunan fisik yang meliputi tipe bentuk (konfigurasi), kepadatan (densiti), differensiasi dan konektiviti. Sumberdaya terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Kota berfungsi terutama sebagai pusat pemukiman dan pelayanan kerja, rekreasi dan transportasi. Pada

umumnya kota menghadapi masalah ekonomi, masalah tata ruang dan masalah lingkungan hidup. Menurut Eko Budihardjo (1998) ruang terbuka adalah bagian dari ruang yang memiliki definisi sebagai wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik.

b.1 Fungsi Ruang Terbuka

Ruang terbuka memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi umum, tempat bermain dan berolah raga, tempat bersantai, tempat komunikasi sosial, tempat peralihan, tempat menunggu. • Sebagai ruang terbuka, ruang ini berfungsi untuk mendapatkan udara segar dari alam. • Sebagai sarana penghubung antara suatu tempat dengan tempat lain. Sebagai pembatas atau jarak di antara massa bangunan.
2. Fungsi ekologis: Penyegaran udara, menyerap air hujan, pengendalian banjir, memelihara ekosistem tertentu. • Pelembut arsitektur bangunan.

b.2 Faktor Pembentuk Ruang Terbuka

Terbentuknya ruang terbuka dipengaruhi oleh beberapa faktor baik oleh alam maupun lingkungan buatan, dibedakan sebagai berikut :

1. Pembatas, dimana ruang selalu terbentuk oleh tiga elemen pembentuk ruang yaitu bidang alas, bidang langit-langit dan bidang pembatas/dinding.
2. Skala, dalam arsitektur menunjukkan perbandingan antara elemen bangunan atau ruang dengan elemen tertentu yang ukurannya sesuai dengan kebutuhan manusia. Skala terdiri atas 2 (dua) macam : Skala manusia, perbandingan ukuran elemen atau ruang dengan dimensi tubuh manusia. Skala generik, perbandingan elemen bangunan atau ruang terhadap elemen lain yang berhubungan dengan sekitarnya. Bentuk, yang terdiri atas bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Dapat juga dikategorikan dalam dua bagian bentuk alami dan buatan. Menurut penampilan terbagi atas: bentuk teratur, bentuk lengkung dan bentuk tidak teratur.

Terbentuknya ruang terbuka dipengaruhi oleh beberapa faktor baik oleh alam maupun lingkungan buatan, dibedakan sebagai berikut : Pembatas, dimana ruang selalu terbentuk oleh tiga elemen

pembentuk ruang yaitu bidang alas, bidang langit-langit dan bidang pembatas/dinding. Skala, dalam arsitektur menunjukkan perbandingan antara elemen bangunan atau ruang dengan elemen tertentu yang ukurannya sesuai dengan kebutuhan manusia. Skala terdiri atas 2 (dua) macam : Skala manusia, perbandingan ukuran elemen atau ruang dengan dimensi tubuh manusia. Skala generik, perbandingan elemen bangunan atau ruang terhadap elemen lain yang berhubungan dengan sekitarnya. Bentuk, yang terdiri atas bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Dapat juga dikategorikan dalam dua bagian bentuk alami dan buatan. Menurut penampilan terbagi atas : bentuk teratur, bentuk lengkung dan bentuk tidak teratur.

Fungsi taman kota sebagai ruang terbuka publik di sebuah perkotaan selain digunakan sebagai tempat masyarakat bertemu, berkumpul dan berinteraksi, baik untuk kepentingan keagamaan, perdagangan maupun membangun sebuah pemerintahan, serta menyampaikan aspirasi warga kotanya, juga kebanggaan dan identitas yang mengandung makna bukan hanya mewakili kotanya tetapi juga bagi negaranya. Ketersediaan taman kota atau disebut juga ruang terbuka hijau (RTH) merupakan suatu keharusan. Keberadaannya kian penting dengan semakin berkembangnya permasalahan pemanasan global dan perubahan iklim yang salah satunya disumbang oleh semakin habisnya hutan dunia. Beberapa negara di Eropa bahkan telah mengembangkan konsep taman ke arah yang lebih maju, yaitu dengan meninggalkan konsep “hutan di tengah kota” dan telah beranjak menjadi konsep “kota di tengah hutan”. Kota-kota tersebut menjadikan 40 persen dari lahannya untuk ruang terbuka hijau, selain itu, daerah pinggiran kota juga disulap menjadi rimbun agar memberikan kesan nyaman dan asri ketika akan memasuki kota. Membangun kota yang memperhatikan lingkungan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Melihat dari standar pemenuhan kebutuhan taman yang telah ditetapkan di negara tetangga seperti Malaysia adalah 1,9 m²/orang, sementara di Jepang minimal 5 m²/orang. Untuk Indonesia, khususnya berapa luasan taman kota yang ideal tampaknya belum ada standar ketetapan secara universal. Patokan luasan taman per orang inipun nampaknya sulit dipertahankan, mengingat jumlah penduduk semakin bertambah, sementara luasan kotanya tetap. Memang luas taman ideal sulit dalam penentuannya, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti letak geografis dan

topografis, tingkat kesejahteraan dan budaya masyarakatnya. Namun mengingat betapa pentingnya fungsi taman kota, maka tentunya harus selalu diupayakan. Menurut Budihardjo (1997), Taman kota mempunyai berbagai fungsi (multi fungsi) baik berkaitan dengan fungsi hidrologi, ekologi, kesehatan, estetika dan rekreasi.

1. Fungsi Hidrologi

Taman kota merupakan lahan terbuka hijau yang dapat berperan dalam membantu fungsi hidrologi dalam hal penyerapan air agar pasokan air dalam tanah (*water saving*) semakin meningkat dan mereduksi potensi banjir dengan mengurangi jumlah aliran limpasan air. Pepohonan yang ada di taman, mampu meresapkan air ke dalam tanah melalui perakarannya. Diperkirakan untuk setiap hektar ruang terbuka hijau, mampu menyimpan 900 m³ air tanah per tahun, sehingga kekeringan sumur penduduk di musim kemarau dapat diatasi.

2. Fungsi Pengaturan Iklim (Klimatologis)

Taman dapat melindungi dari panas matahari dan tekanan suhu panas serta sebagai peneduh. Taman mampu menyerap panas dari atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah disekitar tanaman, sehingga daerah disekitarnya menjadi nyaman. Penghijauan dapat memperkecil amplitudo variasi yang lebih besar dari kondisi udara panas ke kondisi udara sejuk.

3. Fungsi Psikis (Kejiwaan)

Taman kota dapat membawa dan memberikan suasana sejuk dan tentram,serta damai bagi jiwa manusia. Hal ini dapat mengurangi gangguan syaraf dan kejiwaan manusia, sehingga dengan adanya taman tersebut dapat mengalihkan perhatian kita dari suasana tegang serta pengaruh kejiwaan kita menjadi tenang, karena adanya sirkulasi udara dalam kota.

4. Fungsi Kesehatan

Tanaman sebagai jantungnya paru-paru kota merupakan penghasil oksigen (O₂) terbesar dan penyerap karbon dioksida (CO₂) dan zat pencemar udara lain, khusus di siang hari, merupakan pembersih udara yang sangat efektif melalui mekanisme penyerapan (absorpsi) dan penyerapan (adsorpsi) dalam proses fisiologis, yang terjadi terutama pada daun, dan permukaan tumbuhan (batang, bunga, dan buah). Setiap 1 hektar ruang terbuka hijau , yang

ditanami pepohonan, perdu, semak dan penutup tanah, dengan jumlah permukaan daun seluas 5 hektar, maka sekitar 900 Kg CO₂ akan dihisap dari udara, dan melepaskan sekitar 600 Kg O₂ dalam waktu 12 jam.

5. Fungsi Ekologis dan Penyeimbang Alam

Secara ekologis taman kota berfungsi sebagai penjaga kualitas lingkungan kota. Dengan rindangnya taman serta banyak buah dan biji-bijian merupakan habitat yang baik bagi burung-burung untuk tinggal, sehingga dapat mengundang burung-burung, unggas dan serangga untuk berkembang mambantu keseimbangan alam. Taman kota juga dapat berfungsi sebagai filter berbagai gas pencemar dan debu, pengikat karbon, pengatur iklim mikro. Pepohonan yang rimbun, dan rindang, yang terus-menerus menyerap dan mengolah gas karbondioksida (CO₂), sulfur oksida (SO₂), ozon (O₃), nitrogendioksida (NO₂), karbon monoksida (CO), dan timbal (Pb) yang merupakan 80 persen pencemar udara kota, menjadi oksigen segar yang siap dihirup warga setiap saat. Pentingnya tanaman dan hutan sebagai paru-paru kota yang diharapkan dapat membantu menyaring dan menjerap polutan di udara. Setiap jam, satu hektar daun-daun hijau dapat menyerap delapan kilogram CO₂ yang setara dengan CO₂ yang diembuskan oleh napas manusia sekitar 200 orang dalam waktu yang sama.

Menurut penelitian, 1 hektar ruang terbuka hijau (RTH) yang dipenuhi pohon besar menghasilkan 0,6 ton O₂ untuk 1.500 penduduk/hari, menyerap 2,5 ton CO₂/tahun (6 kg CO₂/batang per tahun, menyimpan 900 m³ air tanah/tahun, mentransfer air 4.000 liter/hari, menurunkan suhu 5°C-8°C, meredam kebisingan 25-80 persen, dan mengurangi kekuatan angin 75-80 persen. Setiap mobil mengeluarkan gas emisi yang dapat diserap oleh 4 pohon dewasa (tinggi 10 m ke atas, diameter batang lebih dari 10 cm, tajuk lebar, berdaun lebat).

6. Mempunyai Fungsi Sosial, Ekonomi, dan Edukatif

Tersedianya lahan yang teduh sejuk dan nyaman, mendorong warga kota dapat memanfaatkan tempat berolah raga dan rekreasi dengan berjalan kaki setiap pagi, olah raga dan bermain, dalam lingkungan kota yang benar-benar asri, sejuk, dan segar sehingga dapat menghilangkan rasa capek. Taman kota yang rindang mampu mengurangi suhu lima sampai delapan derajat Celsius, sehingga terasa sejuk. Kondisi yang ramai ini mengundang banyak asongan

untuk menjajankan makanannya, namun tentunya harus diatur dan ditertibkan.

7. Fungsi Pencegah Erosi (Orlogis)

Pepohonan yang rimbun mempunyai akar-akar yang dapat mengikat butir-butir tanah sehingga tidak mudah dibawa air. Daun tanaman dapat menahan atau memperlambat jatuhnya air hujan yang deras, lalu menyerap ke tanah tanpa menimbulkan erosi, karena tanah tertutup oleh tanaman yang dapat mencegah erosi. Bahkan semua jenis rumput, semak-semak, pepohonan mampu menampung air genangan tanpa menimbulkan kelongsoran tanah. Tanpa tanaman, semak-semak, dan pepohonan berakar diatas tanah akan mudah mengakibatkan erosi.

8. Fungsi Estetika

Taman-taman diperkotaan dengan warna yang alami serta tekstur yang bermacam-macam dan perencanaan yang teratur akan menampakkan keindahan. Kelebihan ini menjadikan tanaman sebagai salah satu elemen yang dapat menunjang keindahan lingkungan, sehingga akan memiliki nilai estetika. Taman kota yang indah, dapat juga digunakan warga setempat untuk memperoleh sarana rekreasi dan tempat anak-anak bermain dan belajar. Bahkan taman kota indah dapat mempunyai daya tarik dan nilai jual bagi pengunjung. Jika lingkungan kotanya sehat dengan taman kotanya tertata indah akan menambah daya tarik bagi wisatawan.

Untuk pendekatan perencanaan sebuah taman kota yang sekaligus juga berarti ruang publik, Terdapat tiga dimensi kemanusiaan yang sangat penting harus tercermin dalam ruang publik. Tiga dimensi itu meliputi:

1. Responsif , ruang publik harus dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan warganya,
2. Demokratis, ruang publik yang dapat digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta aksesibel bagi para difabel, lansia dan berbagai kondisi fisik manusia.
3. Bermakna , ruang publik harus memiliki hubungan dengan masyarakat, lingkungannya, serta dunia luas. Dengan demikian ruang publik juga harus memiliki hubungan dengan konteks sosial budaya.

b.3 KONSEP PERDA KOTA MEDAN

Tata Ruang Kota Medan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 Pasal 6 yaitu Penataan ruang wilayah Kota Medan bertujuan untuk: *Pertama*, mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi. *Kedua*, memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri yang berwawasan lingkungan. Dalam Pasal 35 dijelaskan Rencana pola ruang wilayah Kota Medan meliputi : a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya sedangkan Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. hutan lindung; b. kawasan perlindungan setempat; dan c. RTH kota; sementara Pasal 38 menjelaskan : Kawasan RTH kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Medan, Kawasan RTH kota ditetapkan seluas minimum 30,58 % dari luas kawasan kota, Kawasan RTH kota meliputi: RTH kawasan wisata; RTH hutan kota; RTH Taman Kota; RTH Tempat Pemakaman Umum; RTH Jalur Hijau Jalan; RTH Jalur Pejalan Kaki; RTH Atap Bangunan; dan lapangan olah raga.

Sedangkan Pasal 48 ayai (1) menjelaskan bahwa kawasan peruntukan ruang bagi sector informal sebagaimana dimaksud dalam Pasan 35 ayat (3) huruf (h) bertujuan memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima berupa pelataran dan ruang-ruang di pinggir jalan di pusat-pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima.

•

BAB III

MEDAN SELAYANG PANDANG

A. Sejarah Kota Medan

1. Sejarah Awal

Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus marga Sembiring Pelawi, lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer. Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah di antara kedua sungai tersebut.

Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun 1910 bahwa di samping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah liat yang spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda ditempat yang bernama Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata yang berkualitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Deli Klei.

Mengenai curah hujan di Tanah Deli digolongkan dua macam yakni: Maksima Utama dan Maksima Tambahan. Maksima Utama terjadi pada bulan-bulan Oktober s/d bulan Desember sedang Maksima Tambahan antara bulan Januari s/d September. Secara rinci curah hujan di Medan rata-rata 2000 pertahun dengan intensitas rata-rata 4,4 mm/jam.

Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan di sana sini terutama dimuara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi Kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.

Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil bernama "Medan Putri". Perkembangan Kampung "Medan Putri" tidak terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan sungai Deli dan sungai Babura, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Kedua sungai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai, sehingga dengan demikian Kampung "Medan Putri" yang merupakan cikal bakal Kota Medan, cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting.

Semakin lama semakin banyak orang berdatangan ke kampung ini dan isteri Guru Patimpus yang mendirikan kampung Medan melahirkan anaknya yang pertama seorang laki-laki dan dinamai si Kolok. Mata pencarian orang di Kampung Medan yang mereka namai dengan si Sepuluh dua Kuta adalah bertani menanam lada. Tidak lama kemudian lahirlah anak kedua Guru Patimpus dan anak inipun laki-laki dinamai si Kecik.

Pada zamannya Guru Patimpus merupakan tergolong orang yang berfikiran maju. Hal ini terbukti dengan menyuruh anaknya berguru (menuntut ilmu) membaca Al-Qur'an kepada Datuk Kota Bangun dan kemudian memperdalam tentang agama Islam ke Aceh.

Keterangan yang menguatkan bahwa adanya Kampung Medan ini adalah keterangan H. Muhammad Said yang mengutip melalui buku *Deli: In Woord en Beeld* ditulis oleh N. ten Cate. Keterangan tersebut mengatakan bahwa dahulu kala Kampung Medan ini merupakan Benteng dan sisanya masih ada terdiri dari dinding dua lapis berbentuk bundaran yang terdapat dipertemuan antara dua sungai yakni Sungai Deli dan sungai Babura. Rumah Administrateur terletak di seberang sungai dari kampung Medan. Kalau kita lihat bahwa letak dari Kampung Medan ini adalah di Wisma Benteng sekarang dan rumah Administrateur tersebut adalah kantor PTP IX Tembakau Deli yang sekarang ini.

Sekitar tahun 1612 setelah dua dasa warsa berdiri Kampung Medan, Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Kesultanan Aceh mengirim Panglimanya bernama Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintang untuk menjadi pemimpin yang mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli. Gocah Pahlawan membuka negeri baru di Sungai Lalang, Percut. Selaku Wali dan Wakil Sultan Aceh serta dengan memanfaatkan kebesaran imperium Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Medan Deli sekarang. Dia juga mendirikan kampung-kampung Gunung Klarus, Sampali, Kota

Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas Percut dan Sigaragara.

Dengan tampilnya Gocah Pahlawan mulailah berkembang Kerajaan Deli dan tahun 1632 Gocah Pahlawan kawin dengan *Nanggaluan Beru Surbakti* yang merupakan putri Datuk Sunggal bergelar *Sri Indra Baiduzzaman Surbakti* dimana setelah terjadi perkawinan ini raja-raja urung di kuta Medan menyerah pada Gocah Pahlawan, dimana urung-urung ini tetap merdeka dengan kata lain tidak membayar upeti kepada raja Deli.

Gocah Pahlawan wafat pada tahun 1653 dan digantikan oleh puteranya Tuanku Panglima Perunggit, yang kemudian memproklamkan kemerdekaan Kesultanan Deli dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669, dengan ibukotanya di Labuhan, kira-kira 20 km dari Medan.

2. Masa Belanda

Belanda yang menjajah Nusantara kurang lebih tiga setengah abad namun untuk menguasai Tanah Deli mereka sangat banyak mengalami tantangan yang tidak sedikit. Mereka mengalami perang di Jawa dengan Pangeran Diponegoro sekitar tahun 1825-1830. Belanda sangat banyak mengalami kerugian sedangkan untuk menguasai Sumatera, Belanda juga berperang melawan Iskandar Muda Aceh, Kisar Bangun *si Gara mata* di tanah Karo dan Aceh, Imam Bonjol di Minangkabau, dan Raja Sisingamangaraja XII di daerah Tapanuli. Jadi untuk menguasai Tanah Deli Belanda hanya kurang lebih 78 tahun mulai dari tahun 1864 sampai 1942. Setelah perang Jawa berakhir barulah Gubernur Jenderal Belanda Johannes van den Bosch mengerahkan pasukannya ke Sumatera dan dia memperkirakan untuk menguasai Sumatera secara keseluruhan diperlukan waktu 25 tahun. Penaklukan Belanda atas Sumatera ini terhenti di tengah jalan karena Menteri Jajahan Belanda waktu itu Jean Chrétien Baud menyuruh mundur pasukan Belanda di Sumatera walaupun mereka telah mengalahkan Minangkabau yang dikenal dengan nama Perang Paderi (1821-1837).

Sultan Ismail yang berkuasa di Riau secara tiba-tiba diserang oleh gerombolan Inggris dengan pimpinannya bernama Adam Wilson. Berhubung pada waktu itu kekuatannya terbatas maka Sultan Ismail meminta perlindungan pada Belanda. Sejak saat itu terbukalah kesempatan bagi Belanda untuk menguasai Kesultanan Siak Sri Indrapura yang rajanya adalah Sultan Ismail. Pada tanggal 1 Februari 1858 Belanda mendesak Sultan Ismail untuk

menandatangani perjanjian agar daerah taklukan kerajaan Siak Sri Indrapura termasuk Deli, Langkat dan Serdang di Sumatera Timur masuk kekuasaan Belanda. Karena daerah Deli telah masuk kekuasaan Belanda otomatislah Kampung Medan menjadi jajahan Belanda, tapi kehadiran Belanda belum secara fisik menguasai Tanah Deli.

Pada tahun 1858 juga Elisa Netscher diangkat menjadi Residen Wilayah Riau dan sejak itu pula dia mengangkat dirinya menjadi pembela Sultan Ismail yang berkuasa di kerajaan Siak. Tujuan Netscher itu adalah denganuduknya dia sebagai pembela Sultan Ismail secara politis tentunya akan mudah bagi Netscher menguasai daerah taklukan Kesultanan Siak yakni Deli yang di dalamnya termasuk Kampung Medan Putri.

Medan tidak mengalami perkembangan pesat hingga tahun 1860-an, ketika penguasa-penguasa Belanda mulai membebaskan tanah untuk perkebunan tembakau. Jacob Nienhuys, Van der Falk, dan Elliot, pedagang tembakau asal Belanda memelopori pembukaan kebun tembakau di Tanah Deli. Nienhuys yang sebelumnya berbisnis tembakau di Jawa, pindah ke Deli diajak seorang Arab Surabaya bernama Said Abdullah Bilsagih, Saudara Ipar Sultan Deli, Mahmud Perkasa Alam Deli. Nienhuys pertama kali berkebun tembakau di tanah milik Sultan Deli seluas 4.000 Bahu di Tanjung Spassi, dekat Labuhan. Maret 1864, Nienhuys mengirim contoh tembakau hasil kebunnya ke Rotterdam, Belanda untuk diuji kualitasnya. Ternyata, daun tembakau itu dianggap berkualitas tinggi untuk bahan cerutu. Melambunglah nama Deli di Eropa sebagai penghasil bungkus cerutu terbaik. Seperti yang dituliskan oleh Tengku Luckman Sinar dalam bukunya, dijelaskan bahwa "kuli-kuli perkebunan itu umumnya orang-orang Tionghoa yang didatangkan dari Jawa, Tiongkok, Singapura, atau Malaysia, dimana disebutkan dalam catatan berbahasa Belanda bahwa "Belanda menganggap orang-orang Karo dan Melayu malas serta melawan sehingga tidak dapat dijadikan kuli"

Pesatnya perkembangan Kampung "Medan Putri", juga tidak terlepas dari perkebunan tembakau yang sangat terkenal dengan tembakau Delinya, yang merupakan tembakau terbaik untuk pembungkus cerutu. Pada tahun 1863, Sultan Deli memberikan kepada Jacob Nienhuys, Van der Falk dan Elliot dari Firma Van Keeuwen en Mainz & Co, tanah seluas 4.000 bahu (1 bahu = 0,74 ha) secara erfpacht 20 tahun di Tanjung Sepassi, dekat Labuhan. Contoh tembakau deli. Maret 1864, contoh hasil panen dikirim ke Rotterdam

di Belanda, untuk diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau tersebut sangat baik dan berkualitas tinggi untuk pembungkus cerutu.

Perjanjian tembakau ditandatangani Belanda dengan Sultan Deli pada tahun 1865. Selang dua tahun, Nienhuys bersama Janssen, P.W. Clemen, dan Cremer mendirikan perusahaan De Deli Maatschappij yang disingkat Deli Mij di Labuhan. Pada tahun 1869, Nienhuys memindahkan kantor pusat Deli Mij dari Labuhan ke Kampung Medan. Kantor baru itu dibangun di pinggir sungai Deli, tepatnya di kantor PTPN II (eks PTPN IX) sekarang. Dengan perpindahan kantor tersebut, Medan dengan cepat menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan perdagangan, sekaligus menjadi daerah yang paling mendominasi perkembangan di Indonesia bagian barat. Pesatnya perkembangan perekonomian mengubah Deli menjadi pusat perdagangan yang mahsyur dengan julukan *het dollar land* alias tanah uang. Mereka kemudian membuka perkebunan baru di daerah Martubung, Sunggal pada tahun 1869, serta Sungai Beras dan Klumpang pada tahun 1875.

Kemudian pada tahun 1866, Janssen, P.W. Clemen, Cremer dan Nienhuys mendirikan Deli Maatschappij di Labuhan. Kemudian melakukan ekspansi perkebunan baru di daerah Martubung, Sunggal (1869), Sungai Beras dan Klumpang (1875), sehingga jumlahnya mencapai 22 perusahaan perkebunan pada tahun 1874. Mengingat kegiatan perdagangan tembakau yang sudah sangat luas dan berkembang, Nienhuys memindahkan kantor perusahaannya dari Labuhan ke Kampung "Medan Putri". Dengan demikian "Kampung Medan Putri" menjadi semakin ramai dan selanjutnya berkembang dengan nama yang lebih dikenal sebagai "Kota Medan".

Perkembangan Medan Putri menjadi pusat perdagangan telah mendorongnya menjadi pusat pemerintahan. Tahun 1879, Ibukota Asisten Residen Deli dipindahkan dari Labuhan ke Medan, 1 Maret 1887, ibukota Residen Sumatera Timur dipindahkan pula dari Bengkalis ke Medan, Istana Kesultanan Deli yang semula berada di Kampung Bahari (Labuhan) juga pindah dengan selesainya pembangunan Istana Maimoon pada tanggal 18 Mei 1891, dan dengan demikian Ibukota Deli telah resmi pindah ke Medan.

Pada tahun 1915 Residensi Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi Gubernurnemen. Pada tahun 1918 Kota Medan resmi menjadi Gemeente (Kota Praja) dengan Walikota Baron Daniel Mackay. Berdasarkan "Acte van Schenking" (Akta Hibah) Nomor 97

Notaris J.M. de-Hondt Junior, tanggal 30 Nopember 1918, Sultan Deli menyerahkan tanah kota Medan kepada Gemeente Medan, sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada masa awal Kotapraja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir.

Pada tahun 1918 penduduk Medan tercatat sebanyak 43.826 jiwa yang terdiri dari Eropa 409 orang, Indonesia 35.009 orang, Cina 8.269 orang dan Timur Asing lainnya 139 orang. Sejak itu Kota Medan berkembang semakin pesat. Berbagai fasilitas dibangun. Beberapa di antaranya adalah Kantor Stasiun Percobaan AVROS di Kampung Baru (1919), sekarang RISPA, hubungan Kereta Api Pangkalan Brandan - Besitang (1919), Konsulat Amerika (1919), Sekolah Guru Indonesia di Jl. H.M. Yamin sekarang (1923), Mingguan Soematra (1924), Perkumpulan Renang Medan (1924), Pusat Pasar, R.S. Elizabeth, Klinik Sakit Mata dan Lapangan Olah Raga Kebun Bunga (1929). Secara historis perkembangan Kota Medan, sejak awal telah memosisikan menjadi pusat perdagangan (ekspor-impor) sejak masa lalu. sedang dijadikannya medan sebagai ibukota deli juga telah menjadikannya Kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintah. sampai saat ini di samping merupakan salah satu daerah kota, juga sekaligus sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara.

3. Masa Jepang

Tahun 1942 penjajahan Belanda berakhir di Sumatera yang ketika itu Jepang mendarat di beberapa wilayah seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan khusus di Sumatera Jepang mendarat di Sumatera Timur. Tentara Jepang yang mendarat di Sumatera adalah tentara XXV yang berpangkalan di Shonanto yang lebih dikenal dengan nama Singapura, tepatnya mereka mendarat tanggal 11 malam 12 Maret 1942. Pasukan ini terdiri dari Divisi Garda Kemaharajaan ke-2 ditambah dengan Divisi ke-18 dipimpin langsung oleh Letjend. Nishimura. Ada empat tempat pendaratan mereka ini yakni Sabang, Ulele, Kuala Bugak (dekat Peureulak, Aceh Timur sekarang) dan Tanjung Tiram (kawasan Batubara sekarang).

Pasukan tentara Jepang yang mendarat di kawasan Tanjung Tiram inilah yang masuk ke Kota Medan, mereka menaiki sepeda yang mereka beli dari rakyat di sekitarnya secara barter. Mereka bersemboyan bahwa mereka membantu orang Asia karena mereka adalah saudara Tua orang-orang Asia sehingga mereka dieluelukan menyambut kedatangannya. Ketika peralihan kekuasaan Belanda

kepada Jepang Kota Medan kacau balau, orang pribumi mempergunakan kesempatan ini membalas dendam terhadap orang Belanda. Keadaan ini segera ditertibkan oleh tentara Jepang dengan mengerahkan pasukannya yang bernama Kempetai (Polisi Militer Jepang). Dengan masuknya Jepang di Kota Medan keadaan segera berubah terutama pemerintahan sipilnya yang zaman Belanda disebut *gemeentebestuur* oleh Jepang diubah menjadi Medan Sico (Pemerintahan Kotapraja). Yang menjabat pemerintahan sipil di tingkat Kotapraja Kota Medan ketika itu hingga berakhirnya kekuasaan Jepang bernama Hoyasakhi. Untuk tingkat keresidenan di Sumatera Timur karena masyarakatnya heterogen disebut Syucokan yang ketika itu dijabat oleh T. Nakashima, pembantu Residen disebut dengan Gunseibu.

Penguasaan Jepang semakin merajalela di Kota Medan mereka membuat masyarakat semakin papa, karena dengan kondisi demikianlah menurut mereka semakin mudah menguasai seluruh Nusantara, semboyan saudara Tua hanyalah semboyan saja. Di sebelah Timur Kota Medan yakni Marindal sekarang dibangun Kengrohositai sejenis pertanian kolektif. Di kawasan Titi Kuning Medan Johor sekarang tidak jauh dari lapangan terbang Polonia sekarang mereka membangun landasan pesawat tempur Jepang.

4. Masa Kemerdekaan

Dimana-mana di seluruh Indonesia menjelang tahun 1945 bergema persiapan Proklamasi demikian juga di Kota Medan tidak ketinggalan para tokoh pemudanya melakukan berbagai macam persiapan. Mereka mendengar bahwa bom atom telah jatuh melanda Kota Hiroshima, berarti kekuatan Jepang sudah lumpuh. Sedangkan tentara sekutu berhasrat kembali untuk menduduki Indonesia.

Khususnya di kawasan kota Medan dan sekitarnya, ketika penguasa Jepang menyadari kekalahannya segera menghentikan segala kegiatannya, terutama yang berhubungan dengan pembinaan dan pengerahan pemuda. Apa yang selama ini mereka lakukan untuk merekrut massa pemuda seperti Heiho, Romusha, Gyu Gun dan Talapeta mereka bubarkan atau kembali kepada masyarakat. Secara resmi kegiatan ini dibubarkan pada tanggal 20 Agustus 1945 karena pada hari itu pula penguasa Jepang di Sumatera Timur yang disebut Tetsuzo Nakashima mengumumkan kekalahan Jepang. Ia juga menyampaikan bahwa tugas pasukan mereka dibekas pendudukan untuk menjaga status quo sebelum diserahkan kepada pasukan sekutu. Sebagian besar anggota pasukan bekas Heiho, Romusha,

Talapeta dan latihan Gyu Gun merasa bingung karena kehidupan mereka terhimpit dimana mereka hanya diberikan uang saku yang terbatas, sehingga mereka kelihatan berlalu lalang dengan seragam coklat di tengah kota.

Beberapa tokoh pemuda melihat hal demikian mengambil inisiatif untuk menanggulangnya. Terutama bekas perwira Gyu Gun di antaranya Letnan Achmad Tahir mendirikan suatu kepanitiaan untuk menanggulangi para bekas Heiho, Romusha yang famili/saudaranya tidak ada di kota Medan. Panitia ini dinamai dengan "Panitia Penolong Pengangguran Eks Gyu Gun" yang berkantor di Jl. Istana No.17 (Gedung Pemuda sekarang).

Tanggal 17 Agustus 1945 gema kemerdekaan telah sampai ke kota Medan walupun dengan agak tersendat-sendat karena keadaan komunikasi pada waktu itu sangat sederhana sekali. Kantor Berita Jepang "Domei" sudah ada perwakilannya di Medan namun mereka tidak mau menyiarkan berita kemerdekaan tersebut, akibatnya masyarakat tambah bingung. Sekelompok kecil tentara sekutu tepatnya tanggal 1 September 1945 yang dipimpin Letnan I Pelaut Brondgeest tiba di kota Medan dan berkantor di Hotel De Boer (sekarang Hotel Dharma Deli). Tugasnya adalah mempersiapkan pengambilalihan kekuasaan dari Jepang. Pada ketika itu pula tentara Belanda yang dipimpin oleh Westerling didampingi perwira penghubung sekutu bernama Mayor Jacobs dan Letnan Brondgeest berhasil membentuk kepolisian Belanda untuk kawasan Sumatera Timur yang anggotanya diambil dari eks KNIL dan Polisi Jepang yang pro Belanda.

Akhirnya dengan perjalanan yang berliku-liku para pemuda mengadakan berbagai aksi agar bagaimanapun kemerdekaan harus ditegakkan di Indonesia demikian juga di kota Medan yang menjadi bagiannya. Mereka itu adalah Achmad Tahir, Amir Bachrum Nasution, Edisaputra, Rustam Efendy, Gazali Ibrahim, Roos Lila, A.malik Munir, Bahrum Djamil, Marzuki Lubis dan Muhammad Kasim Jusni.

5. Masa Tahun 1990-an dan 2000-an

Pada tahun 1998, dari tanggal 1 hingga 12 Mei, Medan dilanda kerusuhan besar yang menjadi titik awal kerusuhan-kerusuhan besar yang kemudian terjadi di sepanjang Indonesia, termasuk Peristiwa Mei 1998 di Jakarta seminggu kemudian. Dalam kerusuhan yang terkait dengan gerakan "Reformasi" ini, terjadi pembakaran, perusakan, maupun penjarahan yang tidak dapat dihentikan aparat

keamanan. Kota Medan sebagai miniatur Indonesia terus mengalami dampak dari situasi nasional dan tetap bertahan dan berkembang sebagai daerah yang kondusif dan pembangunan terus berjalan.

Medan, yang genap berusia 427 tahun pada tanggal 1 Juli 2017, berkembang menjadi kota metropolitan. Pemerintah Kota Medan pun berambisi memajukan kota ini semaju kota-kota besar lainnya, tidak saja seperti Jakarta atau Surabaya di Jawa, tetapi juga kota-kota di negara tetangga, seperti Penang dan Kuala Lumpur.

B. Visi dan Misi

Semboyan/Slogan Walikota dan Wakil Walikota Medan :
"Medan Rumah Kita"

Dengan Visi : "Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius"

Dengan Misi :

1. Kerjasama
Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
2. Kreatifitas dan Inovasi
Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.
3. Kebhinekaan
Mengembangkan kepribadian masyarakat kota bersarakan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.
4. Penanggulangan Kemiskinan
Meningkatkan percepatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan.
5. Multikulturalisme
Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, perstuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.

6. Tata Ruang Kota yang Konsisten
Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
7. Peningkatan Kesempatan Kerja
Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
8. Smart City
Mengembangkan Medan sebagai *Smart City*.

C. Letak Geografis Kota Medan

Secara geografis Kota Medan terletak antara 2° 27'-2° 47' Lintang Utara, dan 98° 35'-98° 44' Bujur Timur, dimana kota tersebut berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Barat, Timur dan Selatan serta Selat Malaka di sebelah Utara. (Anonimous, 2002).

Secara geografis, Kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber alam seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan Kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan dan saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara 23,2°C - 24,3°C dan suhu maksimum berkisar antara 30,8°C - 33,2°C serta menurut Stasiun Sampali suhu minimumnya berkisar antara 23,3°C - 24,1°C dan suhu maksimum berkisar antara 31,0°C - 33,1°C.

Kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata berkisar antara 84 - 85%. kecepatan angin rata-rata sebesar 0,48 m/sec, sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 104,3 mm. Kota Medan juga merupakan jalur sungai. Paling tidak ada 7 (tujuh) sungai yang melintasinya, yaitu :

1. Sungai Belawan
2. Sungai Badra
3. Sungai Sikambing
4. Sungai Putih
5. Sungai Babura
6. Sungai Deli
7. Sungai Sulang-Saling/Sei Kera

Manfaat terbesar dari sungai-sungai ini adalah sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai.

D. Komposisi Penduduk

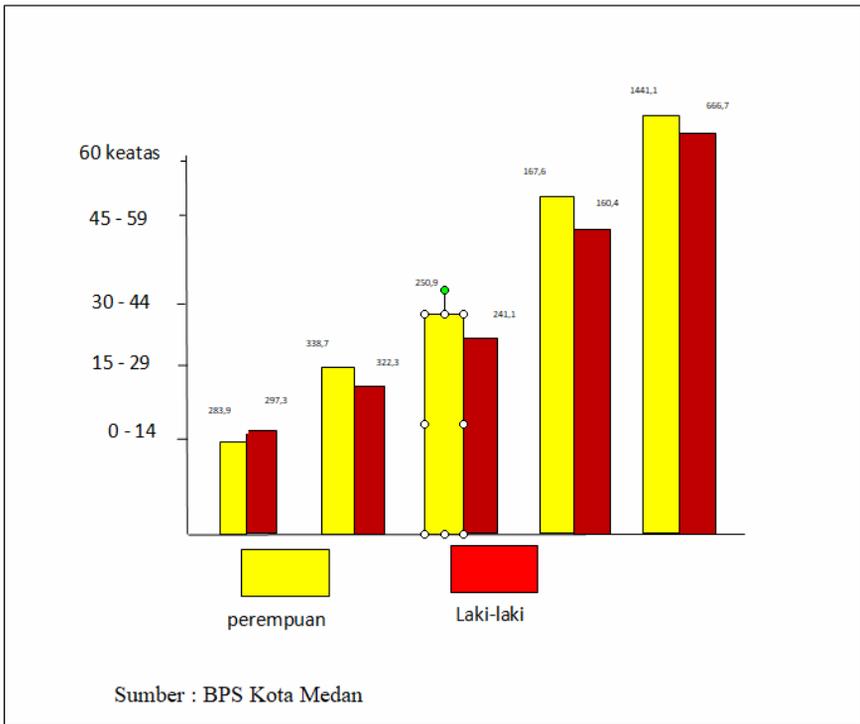
Jumlah penduduk Kota Medan akhir tahun 2011 mencapai 2,1 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,1% per tahun, sehingga Kota Medan tercatat sebagai kota dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Laju pertumbuhan penduduk Kota Medan dari tahun 2005 menunjukkan trend menurun atau perlambatan penambahan penduduk. Penurunan laju pertumbuhan penduduk antara lain didorong oleh pelaksanaan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya norma keluarga kecil sejahtera, dan perubahan cara pandang penduduk Kota Medan yang tidak lagi menganggap "*banyak anak banyak rezeki*". Kelompok keluarga muda cenderung memilih untuk memiliki anak yang semakin berkualitas.

Disamping itu penduduk Kota Medan memiliki ciri keragaman (pluralitas) baik dari agama, suku etnis, budaya dan adat istiadat. Hal ini memunculkan karakter penduduk Kota Medan yang bersifat terbuka dan dinamis. Perkembangan kependudukan Kota Medan pada saat ini juga ditandai oleh proses transisi demografi, yaitu proses penurunan tingkat kesuburan sampai terciptanya jumlah penduduk yang stabil. Penurunan tingkat kelahiran antara lain disebabkan oleh perubahan pola pikir dan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, perbaikan gizi dan status kesehatan juga mempengaruhi penurunan tingkat kematian. Pada akhir proses transisi demografi, tingkat kelahiran dan kematian tidak banyak berubah sehingga jumlah penduduk cenderung tidak berubah, kecuali adanya migrasi. Kesejahteraan Masyarakat Secara umum, kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Medan dipengaruhi kondisi perekonomian daerah termasuk faktor kualitas dan pemerataannya.

Program kependudukan di Kota Medan seperti halnya di daerah Indonesia lainnya meliputi: pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan. Komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Menurunnya tingkat kelahiran (*fertilitas*) dan tingkat kematian (*mortalitas*),

meningkatnya arus perpindahan antar daerah (*migrasi*) dan proses urbanisasi, termasuk arus ulang alik, akan mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan. Adapun data penduduk di Kota Medan adalah sebagai berikut :

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2015



Berdasarkan data tersebut, bahwa kelompok umur penduduk terbanyak adalah kelompok umur 15-29 tahun, berjumlah 665.091 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa angkatan yang tersedia termasuk kelompok umur yang relative muda dianggap mempunyai produktivitas yang tinggi. Angkatan kerja tersebut merupakan ancaman bilamana tidak tertampung dalam lapangan kerja yang tersedia. Oleh sebab itu, kegiatan perdagangan sektor informal khususnya PKL dianggap sebagai salah satu solusi untuk penyaluran tenaga kerja yang tersedia, terlebih-lebih banyak tenaga kerja wanita yang menjadi PKL di pasar-pasar.

TABEL 2
PENDUDUK KOTA MEDAN
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2000 - 2009 , 2015

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	945.847	958.426	1.904.273
2001	960.477	966.043	1.926.520
2002	979.106	984.776	1.963.882
2003	990.216	1.003.386	1.993.602
2004	995.968	1.010.174	2.006.142
2005	1.012.040	1.024.145	2.036.185
2006	1.027.607	1.039.681	2.067.288
2007	1.034.696	1.048.460	2.083.156
2008	1.039.707	1.062.398	2.102.105
2009	1.049.457	1.071.596	2.121.053
2015	1.091.937	1.118.687	2.210.624

Sumber BPS Kota Medan

Keterangan : * Angka Sementara

TABEL 3
PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2015

No	Kecamatan.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Medan Tuntungan	42 288	43 325	85 613
2.	Medan Johor	65 207	66 805	132 012
3.	Medan Amplas	61 176	62 674	123 850
4.	Medan Denai	72 147	73 914	146 061
5.	Medan Area	48 897	50 095	98 992
6.	Medan Kota	36 769	37 670	74 439
7.	Medan Maimun	20 086	20 577	40 663
8.	Medan Polonia	27 636	28 313	55 949
9.	Medan Baru	20 025	20 515	40 540
10.	Medan Selayang	52 433	53 717	106 150
11.	Medan Sunggal	57 192	58 593	115 785
12.	Medan Helvetia	74 448	76 273	150 721
13.	Medan Petisah	31 303	32 071	63 374
14.	Medan Barat	35 902	36 781	72 683
15.	Medan Timur	55 036	56 384	111 420
16.	Medan Perjuangan	47 361	48 521	95 882
17.	Medan Tembung	67 759	69 419	137 178
18.	Medan Deli	89 632	91 828	181 460
19.	Medan Labuhan	58 025	59 447	117 472
20.	Medan Marelan	80 152	82 115	162 267
21.	Medan Belawan	48 463	49 650	98 113
	Kota Medan	1 091 937	1 118 687	2 210 624

E. Keadaan Ekonomi

Medan, kota berpenduduk lebih dari 2,1 juta orang memiliki areal seluas 26.510 hektar atau 3,6 persen dari total wilayah Provinsi Sumatera Utara yang secara administratif dibagi atas 21 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan. Sebagai sebuah kota, ia mewadahi berbagai fungsi, yaitu, sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat industri, pusat jasa pelayanan keuangan, pusat komunikasi, pusat akomodasi kepariwisataan, serta berbagai pusat perdagangan regional dan internasional. Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara memiliki posisi strategis yang semakin menguat baik secara regional maupun nasional. Posisi ini menjadi modal dasar dalam pembangunan kota.

Kota Medan, sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga kota metropolitan baru di Indonesia, memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan secara regional/internasional di kawasan barat Indonesia, yang didukung oleh ketersediaan Bandara Kuala Namu dan Pelabuhan Laut Belawan serta infrastruktur dan utilitas kota lainnya.

Dibanding kota besar lainnya, Kota Medan memiliki keterbatasan ruang sebagai akibat bentuk wilayah administratif yang ramping ditengah. Dengan keterbatasan ruang tersebut, daya dukung lingkungan perkotaan menjadi kurang optimal terutama hambatan alamiah dalam pengembangan wilayah utara Kota Medan, khususnya dalam penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Kondisi tersebut juga menyebabkan cenderung kurang seimbang dan kurang terpadunya penataan ruang kota di bagian utara dan bagian selatan. Infrastruktur seperti Pelabuhan Belawan dapat dicapai hanya dalam waktu kurang dari satu jam lewat jalan bebas hambatan. Dan Bandara Kuala Namu di Deli Serdang hanya berjarak satu jam perjalanan dan dapat ditempuh melalui moda transportasi Kereta Api.

Demikian pula dengan kawasan industrinya. Pendek kata, seolah semua tidak ingin jauh-jauh dari pusat kota. Tendensi pertumbuhan yang semakin menuju ke pusat ini ibarat pola alamiah makhluk hidup yang tidak bisa jauh-jauh dari sumber makanannya. Akibatnya, Medan bertambah sumpek dengan belasan bangunan beton yang akan segera menjelma menjadi pusat perbelanjaan. Lalu lintas kota semakin semrawut karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan ketidakdisiplinan angkutan umum yang jumlahnya

terus bertambah terutama pada trayek-trayek "basah". Kondisi dan perkembangan Kota Medan sekarang, tampaknya memang seolah tanpa perencanaan. Padahal, di atas kertas, sejak 1997, pemerintah kota di masa Wali Kota Bachtiar Jaffar sebetulnya telah menyusun rencana pengembangan kota yang cukup bagus. Konsep itu dikenal dengan istilah "Mebidang", yakni singkatan dari Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Konsep yang barangkali diilhami oleh pola pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) tersebut pada dasarnya mengacu pada antisipasi semakin berkurangnya daya dukung kota terhadap perkembangannya dan berkurangnya kemampuan kota menjalankan fungsinya secara maksimal.

Medan akan dijadikan sebagai kota inti yang terbagi dalam lima wilayah pembangunan, sementara Kota Binjai dan beberapa kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang akan dikembangkan sebagai kota satelit. Wilayah Metropolitan Mebidang ini akan meliputi area seluas 163.378 hektar. Berdasarkan konsep tersebut, akan dibangun pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah-daerah yang menjadi *hinterland* Medan. Tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan pembangunan justru makin meminggirkan warga kota, sementara daerah pinggirannya tetap terbelakang. Konsep Mebidang, akhirnya hanyalah sekadar konsep yang jalan di tempat.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, Kota Medan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu pusat perekonomian daerah dan regional yang penting serta utama di Pulau Sumatera. Kota Medan memiliki kedudukan, fungsi dan peranan penting serta strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan barang dan keuangan domestik, maupun regional/internasional dikawasan barat Indonesia dengan dukungan faktor-faktor dominan yang dimilikinya.

Pembangunan dan pengembangan fisik Kota Medan diarahkan untuk kepentingan kerjasama pembangunan kawasan industri dan perdagangan baru dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menciptakan daya tarik pusat kota dan mendorong pengembangan dunia usaha. Keinginan untuk menjadikan Kota Medan sebagai kota jasa, perdagangan, keuangan dan industri berskala regional dan nasional didukung oleh beberapa faktor antara lain : (1) 60,8% industri perbankan memilih lokasi di Kota Medan; (2) 84,8% kredit perbankan diserap oleh kegiatan ekonomi kota; (3) Usaha industri yang terus berkembang, dimana sampai saat ini telah

mencapai 5.596 usaha, baik berskala usaha besar, sedang dan kecil; (4) ketersediaan kawasan-kawasan industri; (5) berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, kota-kota baru, perhotelan, pusat-pusat jajanan, dan lain-lain serta (6) struktur ekonomi kota yang terbentuk sampai saat ini yang cenderung semakin kuat secara fundamental.

Sesuai dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Utara, RTRW Mebidangro dan RTRW Kota Medan, potensi pengembangan wilayah Kota Medan yang utama adalah: (1) sebagai pusat kegiatan nasional, (2) sebagai kawasan strategis nasional, (3) sebagai ibukota propinsi Sumatera Utara, (4) sebagai pusat jasa, perdagangan, industri, pariwisata, pendidikan dan kesehatan, dan (5) sebagai dinamisator serta lokomotif bagi pertumbuhan wilayah hinterlandnya sehingga direncanakan menjadi salah satu Kota Metropolitan baru di Indonesia.

Potensi pengembangan wilayah Kota Medan juga didukung oleh kedudukan strategis Kota Medan secara regional, nasional dan internasional, seperti Medan memiliki jarak tempuh yang relatif singkat dengan kota-kota/negara-negara lain secara regional/internasional, yaitu : (1) Kuala Lumpur : 40 menit, (2) Pulau Pinang/Ipoh : 30 menit, (3) Singapore : 55 menit, (4) Pekanbaru/Padang : 45 menit, (5) Aceh : 40 menit dan (6) Jakarta : 120 menit, dan lain-lain.

Struktur perekonomian kota yang kokoh akan menjadi motor penggerak perekonomian dan sekaligus penopang ketahanan ekonomi daerah. Struktur ekonomi Kota Medan didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 27,09 persen pertahun. Sumbangan sektor transportasi dan telekomunikasi rata-rata sebesar 20,52 persen, sektor industri dan pengolahan sebesar 12,86 persen, serta sektor keuangan dan jasa perusahaan sebesar 14,52 persen pertahun. Ciri perekonomian Kota Medan yang berbasis sektor jasa, perdagangan dan restoran juga dipengaruhi oleh pola perkembangan Kota Medan yang ditandai oleh meningkatnya pusat-pusat perdagangan yang berskala besar, bangunan hotel-hotel dan restoran, serta transportasi dan telekomunikasi.

Kondisi perekonomian Kota Medan sesuai dengan indikator pokok ekonomi makro dapat disajikan seperti Produk Domestik Regional Bruto atas harga dasar konstan (2000) Kota Medan terus meningkat. Nilai PDRB meningkat dari Rp. 33,4 Trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp. 38,5 Trilyun pada tahun 2011 atau meningkat

sebesar 14,84 persen. Pertumbuhan PDRB Kota Medan pada tahun 2011 mencapai 7,69 persen dengan pertumbuhan tertinggi di sektor jasa sebesar 9,22 persen, sektor keuangan dan jasa perusahaan sebesar 9,07 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,04 persen.

Sementara, pertumbuhan paling rendah terjadi pada sektor penggalian. Pertumbuhan ekonomi Kota Medan dipengaruhi oleh penambahan jumlah tenaga kerja dan investasi terutama di sektor tersier (jasa-jasa) dan sekunder (industri pengolahan). Pertumbuhan PDRB tersebut menunjukkan bahwa kinerja perekonomian kota selama periode 2005 -2009 relatif baik didukung oleh struktur ekonomi yang sebagian besar dari sektor tersier (69,71 persen), sektor sekunder (27,40 persen) dan sektor primer (2,89 persen). Walaupun pertumbuhan PDRB (ADHK) Kota Medan selama periode Tahun 2005-2009 relatif cukup berarti, namun tantangan klasiknya adalah pertumbuhan yang belum sepenuhnya berkualitas mendukung efisiensi perekonomian kota, disamping belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja secara masif.

F. Sekilas Tentang Perkembangan PKL di Kota Medan

Fenomena kegiatan ekonomi sektor informal di Kota Medan sebabkan oleh tekanan penduduk sudah sedemikian kritis. Disamping terbatasnya lapangan kerja dan proses industrialisasi yang terpusat di daerah perkotaan yang padat modal membawa konsekuensi bahwa hanya tenaga kerja terampil saja yang dapat memasuki sektor modern yang formal, sementara sektor informal pada saat yang bersamaan mengalami peningkatan dalam kapasitas intensitas dan jumlah kegiatannya.

Membengkaknya sektor informal di Kota Medan merupakan akibat dari derasnya arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh perbedaan penghasilan yang diharapkan, meskipun harapan tersebut sering meleset dari kenyataan. Akibatnya, para migrant yang tidak bias masuk ke sektor formal di kota terlempar keluar, kemudian migrant tersebut berusaha masuk ke sektor informal yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk masuk ke dalamnya. Karena itu, sektor informal dikenal juga sebagai katup pengaman dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan.

Keberadaan PKL di Kota Medan telah lama, namun tidak jelas kapan kegiatan itu mulai eksis di wilayah tersebut. Keberhasilan pembangunan kota selalu diindikasikan dengan pertumbuhan

ekonomi yang meningkat, dimana dalam aspek special ditunjukkan akan selalu diikuti dengan peningkatan luasan pemanfaatan lahan. Penambahan luasan ini pada titik tertentu akan menimbulkan permasalahan kota, karena kemampuan kota untuk menyediakan lahan bagi aktivitas penduduknya sangat terbatas, dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Terbatasnya serapan tenaga kerja di sektor formal, sedangkan jumlah angkatan kerja tinggi maka sebagian besar tenaga kerja tersebut masuk ke dalam sektor informal termasuk PKL. Mengingat kegiatan ini mudah dilakukan dan kurang membutuhkan keahlian/keterampilan tertentu, kemudian tidak membutuhkan modal yang besar serta hasilnya dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Kondisi usaha PKL di Kota Medan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa PKL melakukan kegiatan berdagang umumnya di tempat-tempat umum, seperti di sisi jalan, trotoar jalan, perempatan jalan, dekat dengan pasar umum atau tradisional, sekitar sekolahan/perkantoran/perbankan/pertokoan/supermall, maupun di sekitar blok perumahan;
- b. Barang-barang yang didagangkan berupa bahan-bahan makanan maupun makanan siap saji, minuman, rokok, buah-buahan, sayur mayor, ikan dan daging, bunga, kaset, buku-buku teks, alat-alat tulis, mainan anak-anak, pakaian baru dan bekas, bahan-bahan asesoris dan alat-alat rumah tangga (peralatan memotong, piring, baskom/panik, ember, sapu), penjual obat;
- c. Para PKL tidak mempunyai ijin untuk berdagang, dan berdagang dimana saja, tetapi tidak termasuk sebagai pelaku tindak criminal;
- d. Tidak dikenai pajak, tetapi dikenai retribusi seperti retribusi keamanan, retribusi kebersihan oleh pemerintah kota melalui Dinas Pasar;
- e. Usaha dimiliki secara perorangan dengan tenaga kerja sendiri atau oleh anggota keluarga;
- f. Usaha ini termasuk usaha kecil bahkan sering mempekerjakan anggota keluarga dengan tidak mengenal upah resmi;
- g. Tenaga kerja dalam kegiatan usaha kaki lima tidak dilindungi dengan jaminan sosial atau standar upah/gaji, juga tidak dilindungi dengan jaminan tunjangan hari tua;

- h. Melakukan usaha dagang dengan modal terbatas dan umumnya modal berasal tabungan sendiri atau meminjam sejumlah uang dari keluarga atau rentenir;
- i. Melakukan usaha di suatu tempat secara menetap pada suatu tempat yang telah disediakan ataupun tidak oleh pemerintah setempat, kemudian ada juga yang melakukan usaha secara bergerak baik dengan menggunakan alat transportasi seperti kereta dorong, sepeda, dan kendaraan bermotor ataupun yang dijajahkan secara berkeliling;
- j. Usaha berjualan di kaki lima dapat dilakukan dengan periode waktu tertentu (pagi, siang, sore dan malam hari)
- k. Manajemen usaha dilakukan dengan sederhana.

Kegiatan PKL tersebut, meskipun dijalankan dengan manajemen yang sederhana dan modal yang terbatas, tetapi memberikan dampak positif terhadap masyarakat terutama yang kurang beruntung dalam memperoleh pekerjaan. Perkembangan perdagangan sektor informal yang pada umumnya terdiri dari usaha pedagang kaki lima, pedagang keliling dan asongan (ketiga jenis pedagang ini merupakan yang dominan), pada akhir-akhir ini mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang luar biasa di kota-kota besar, terutama akibat krisis ekonomi yang menyebabkan jutaan pekerja terkena PHK menyebabkan mereka harus mencari usaha sendiri dengan modal sendiri. Usaha yang mudah dengan modal yang tidak terlalu besar tetapi dapat memberikan hasil yang lumayan untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah dengan berjualan makanan dan minuman. Dan tempat yang mudah dijangkau konsumen dan tidak harus membayar mahal untuk sewa tempat adalah di kaki-lima atau diempiran toko di daerah perkotaan.

Jumlah pedagang kaki lima ini tidak dapat atau sulit sekali untuk diketahui secara pasti jumlahnya karena mereka selalu berpindah-pindah dengan tujuan untuk mendekati konsumen atau menghindari penertiban, atau sering lokasi yang mereka cari disesuaikan dengan jenis dagangan yang mereka perdagangkan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Pemerintah daerah Kota Medan yang sebelumnya berusaha membatasi perkembangan perdagangan sektor informal ini dengan membuat berbagai peraturan dan kebijakan berupa pembatasan lokasi berjualan, melakukan razia dan penertiban. Dan Pemerintah Kota Medan juga mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tahun 2011 -

2031. Kota Medan telah memiliki visi yang jelas tentang tata ruang seperti apa yang bisa mengakomodir keberadaan PKL. Dalam Pasal 48 dijelaskan yaitu :

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf h bertujuan memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima berupa pelataran dan ruang-ruang di pinggir jalan di pusat-pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima.
- (2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima di pusat-pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima.
- (3) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelataran dan ruang-ruang dipinggir jalan berupa lahan untuk kios pedagang lima kaki yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kota.
- (4) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di sub pusat pelayanan Kota Medan dan mengendalikan pertumbuhan sektor informal yang berlokasi di Pusat Pelayanan Kota.

Tampaknya Pemerintah Kota Medan masih mengalami kesulitan untuk menggarap dan membangun sektor informal secara tuntas dan sering terbentur oleh beberapa kendala antara lain : *Pertama*, kurangnya pengetahuan deskriptif maupun analitis mengenai jenis, unit dan luas kegiatan sektor informal ini. *Kedua*, tidak mempunyai kekuasaan birokrat untuk mencapai daerah pedesaan, pinggiran kota, dan pemukiman kumuh yang kebanyakan digeluti pelaku sektor informal. *Ketiga*, kurangnya tenaga yang mampu mengetahui dengan baik seluk-beluk ekonomi sektor informal. *Keempat*, tidak adanya sumber dana yang dapat mencukupi permintaan sektor informal yang luas ini.

•

BAB IV

ANALISA DATA PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian terhadap Pedagang Sektor Informal sub sektor Kuliner, penelitian mengambil data dari 70 (tujuh puluh) sample pedagang Kaki Lima yang tersebar di tujuh Kecamatan di wilayah Kota Medan, yang meliputi Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal dan Kecamatan Medan Tuntungan yang meliputi 14 Kelurahan yakni Asam Kumbang, Babura, Dwikora, Helvetia Tengah, Padang Bulan, PB. Selayang, Sei Agul, Sei Kambing, Sei Sikambing, Sunggal, Sunggal Kanan, Tanjung Rejo, Tanjung Sari dan Tanjung Selamat yang dilakukan selama kurun waktu 2 (dua) Minggu, dimulai dari tanggal 11 November 2016 dan berakhir tanggal 25 November 2016.

Pengambilan Sample penelitian meliputi responden untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 31 orang dengan persentase sebesar 44,3 % dan jenis kelamin perempuan sebanyak 39 orang atau 55,7 % dari total 70 orang responden, dengan sebaran di 27 lokasi jalan di kota Medan. Hal ini tersaji dalam tabel berikut :

Jenis Kuliner	Frequency	Percent
Ayam Goreng	1	1.4
Ayam Penyet	2	2.9
Bakso	1	1.4
Bakso Bakar	1	1.4
Bakso Bakar &	1	1.4
Batagor		
Batagor	4	5.7
Brownies Amanda	1	1.4
Burger	1	1.4
Burger & Es Tebu	1	1.4
Es Buah	1	1.4
Es Campur	1	1.4
Es Dawet	2	2.9
Es Dogger	1	1.4
Es Durian	1	1.4
Es Jagung	1	1.4
Es Jeruk	2	2.9

Es Kelapa	4	5.7
Es Tebu	4	5.7
Fourty Eight	1	1.4
Gorengan	3	4.3
Gorengan, Minuman, Rokok	1	1.4
Jual Makanan (Lauk Pauk)	1	1.4
Jualan Molen, Tela-tela	1	1.4
Jualan Rujak	1	1.4
Keripik	1	1.4
Kolak Durian	2	2.9
Kue	1	1.4
Lemang	1	1.4
Makanan & Minuman	2	2.9
Makanan Ringan, Indomie, Soto, Nasgor	1	1.4
Martabak	1	1.4
Martabak Mini	1	1.4
Mie & Gorengan	1	1.4
Mie Ayam	2	2.9
Mie Ayam Bakso	3	4.3
Mie Goreng, Gorengan dan Minuman	1	1.4
Minuman Pop Ice	1	1.4
Molen	3	4.3
Pecal	1	1.4
Piscok	1	1.4
Pokat Kocok	1	1.4
Roti	1	1.4
Rujak	2	2.9
Sarapan Pagi	1	1.4
Sate	1	1.4
Sup Buah	1	1.4
Taiso	1	1.4
Warkop	1	1.4
Total	70	100.0

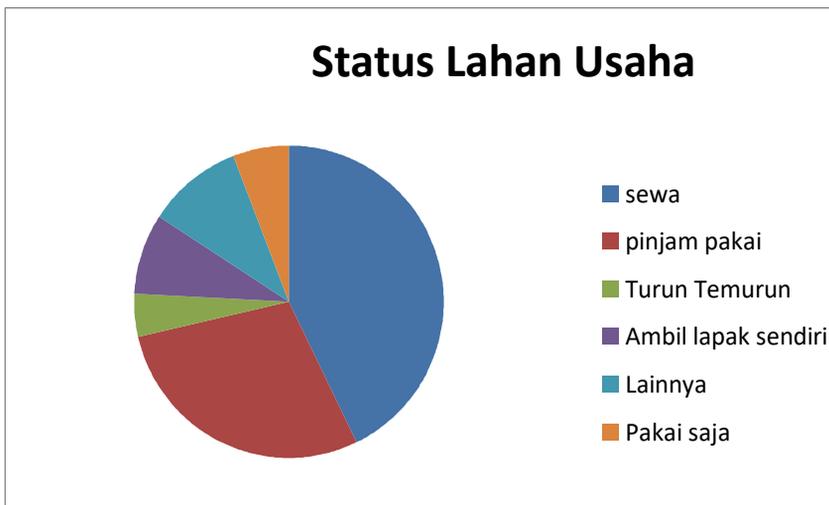
Adapun setelah dilakukan pengkajian penelitian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Rumusan Masalah yang telah ditetapkan, maka dapat diambil suatu jawaban dari responden, yaitu:

1. Untuk pertanyaan Typologi dari pemanfaatan Lahan Sektor Informal,

a. Status Lahan Usaha

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 1.1, didapatkan sebanyak 30 responden atau sebesar 42,9 persen melakukan transaksi sewa menyewa; 20 responden atau sebesar 28,6 persen pinjam pakai; 3 responden atau sebesar 4,3 persen di dapat dari usaha turun temurun; 6 responden atau sebesar 8,6 persen mengambil lahan usaha sendiri, sebanyak 4 orang responden atau sebesar 5,7 persen tinggal memakai saja lahan usahanya, dan selebihnya sebanyak 7 orang responden atau 10 persennya status lahan usahanya didapat dari aneka ragam cara. Untuk sewa menyewa lahan usaha, para pedagang sektor informal memperolehnya dari para pemilik ruko yang pelatarannya di sewakan untuk berjualan, juga diperoleh dari menyewa rumah ataupun menyewa dari sesama pedagang. Hal ini sesuai dengan tabel penyajian tentang Status Lahan Usaha, digambarkan dalam diagram Pie sebagai berikut :

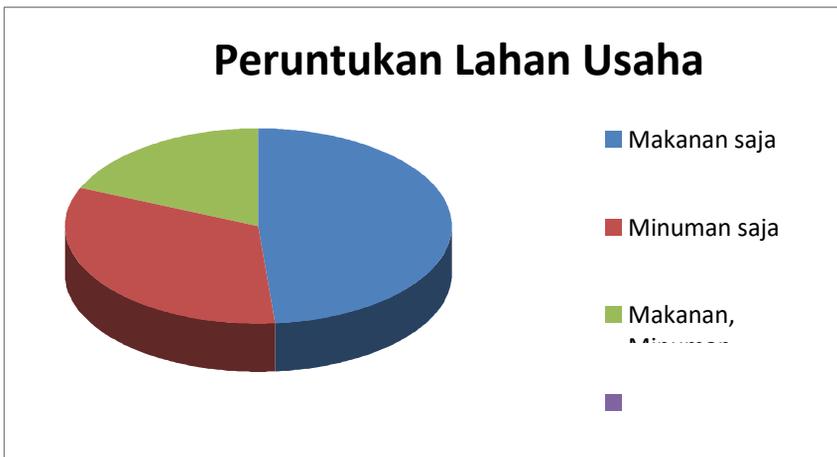
Tabel 1.1



b. Peruntukan Lahan Usaha

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 1.2, didapatkan sebanyak 34 responden atau 48.6 persen menggunakannya hanya untuk berjualan makanan saja, 23 responden atau 32.9 persen lahan berjualan minuman saja, 13 responden atau 18.6 persen melakukan peruntukan lahan usahanya untuk berjualan makanan dan minuman sekaligus dapur pengolahannya. Hal ini tersaji dalam diagram Pie berikut:

Tabel 1.2

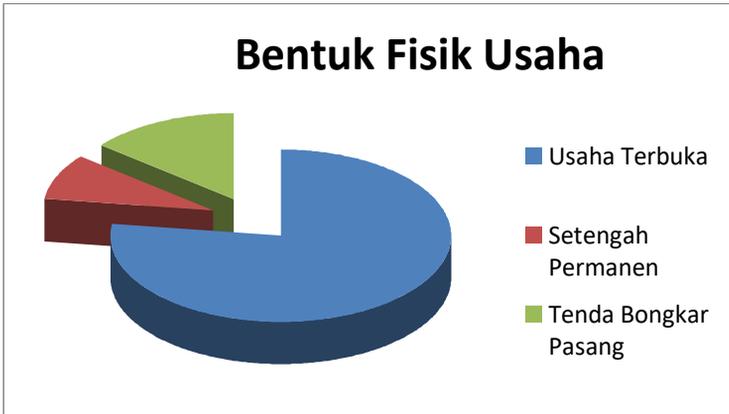


c. Bentuk Fisik Usaha

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 1.3, didapatkan sebanyak 54 responden atau 77.1 persen menggunakannya sebagai usaha terbuka, 6 responden atau 8.6 persen setengah permanen terbuka sedangkan sisanya sebesar 10 orang responden atau 14.3 persen memakai tenda bongkar pasang.

Besarnya angka persentase pedagang sektor informal yang menggunakannya sebagai usaha terbuka dikarenakan umumnya banyak pedagang sektor informal kaki lima ini berpendapat bahwa usahanya dapat sewaktu-waktu terkena pengusuran ataupun penertiban dari pemerintah setempat sehingga mereka berpikiran praktis dan sederhana dalam membentuk fisik usahanya tanpa harus bersusah payah menata kelola barang-barang dagangan kulinernya. Hal ini tersaji dalam diagram Pie berikut :

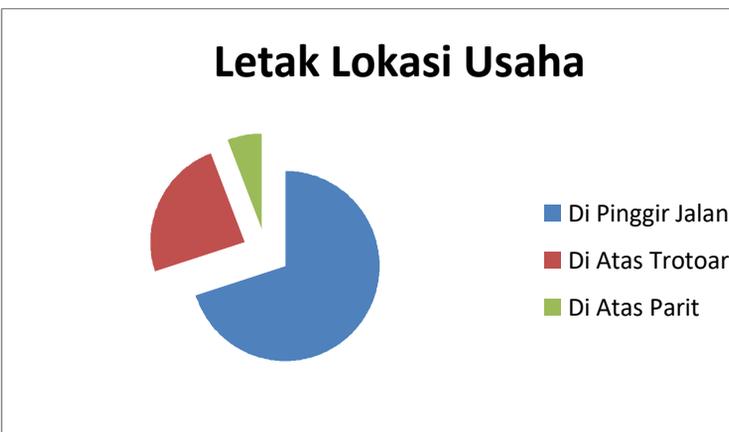
Tabel 1.3



d. Letak Lokasi Usaha

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 1.4, didapatkan sebanyak 49 responden atau 70.0 persen melakukan usahanya di pinggir jalan, 17 responden atau 24.3 persen berjualan di atas trotoar sedangkan sisanya sebanyak 4 orang responden atau 5.7 persen berjualan di atas parit. Besarnya angka persentase pedagang sektor informal yang berjualan di pinggir jalan dikarenakan alasan agar mudah terlihat oleh pengguna jasa sektor informal atau dapat dikatakan merupakan tempat strategis bagi pedagang sektor informal ini untuk berjualan dikarenakan posisinya yang strategis di pinggir jalan. Hal ini tersaji dalam diagram Pie berikut :

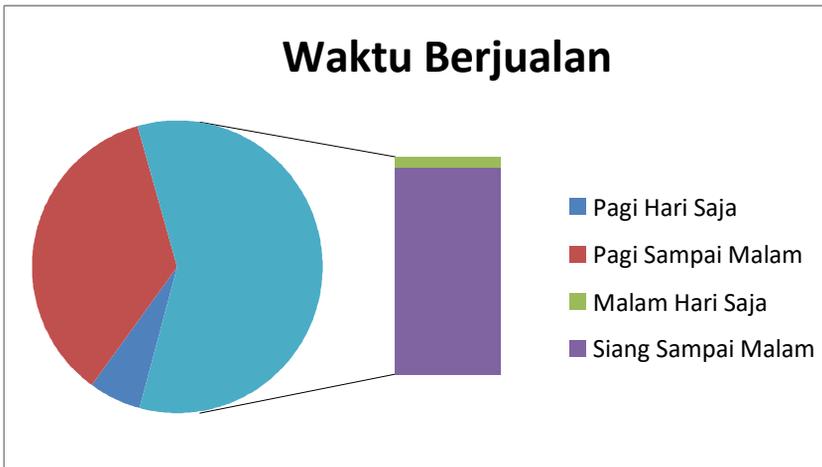
Tabel 1.4



e. Waktu Berjualan

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 1.5, didapatkan sebanyak 4 responden atau 5.7 persen berjualan hanya di pagi hari saja, 25 responden atau 35.7 persen berjualan dari pagi samapai malam, ada 2 responden atau 2.9 persen yang berjualan hanya pada malam hari, sedangkan sisanya sebanyak 39 orang responden atau 55.7 persen berjualan dari siang sampai malam. Hal ini tersaji dalam diagram Pie berikut :

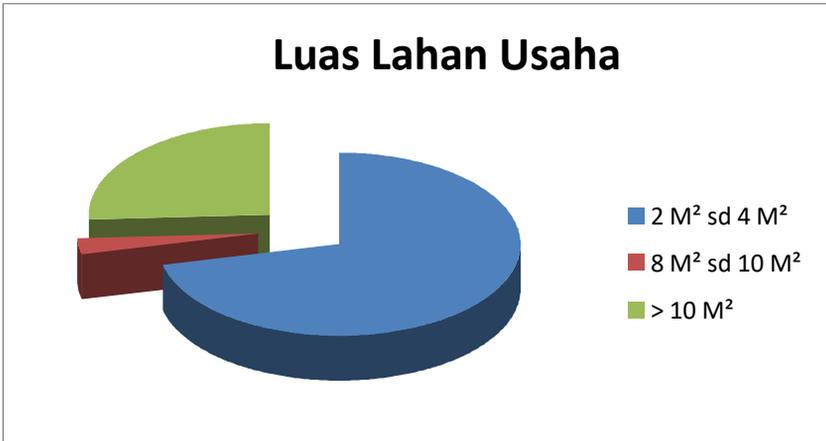
Tabel 1.5



f. Luas Lahan Usaha

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 1.6, didapatkan sebanyak 50 responden atau 71.4 persen mengambil lahan seluas 2 M² sampai dengan 4 M², 2 responden atau 2.9 persen mengambil luas lahan usaha sebesar 8 M² sampai dengan 10 M² sedangkan sisanya sebanyak 18 orang responden atau 25.7 persen mengambil luas lahan lebih dari 10 M². Besarnya angka persentase pedagang sektor informal yang mengambil luasan lahan 2 M² sampai dengan 4 M², dikarenakan mereka umumnya berpendapat agar mudah dalam menata kelola barang-barang jualannya serta mereka beranggapan jika sewaktu-waktu terjadi penertiban pedagang kaki lima maka mereka dengan cepat dapat merapihkan barang-barang dagangannya. Hal ini tersaji dalam diagram Pie berikut :

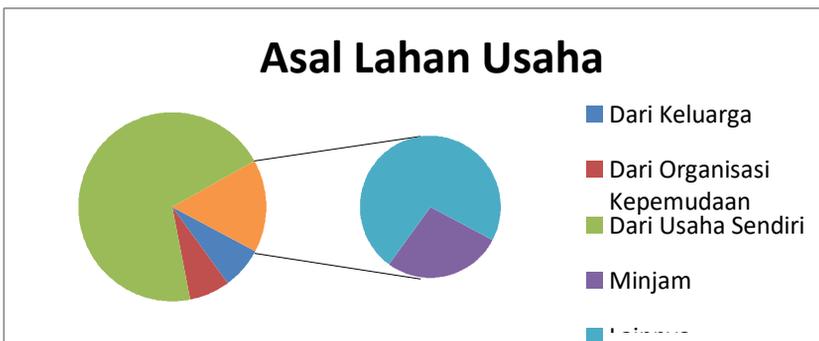
Tabel 1.6



g. Asal Lahan Usaha

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 1.7, didapatkan sebanyak 5 orang responden atau 7.1 persen memperolehnya dari keluarga, 5 responden lagi atau 7.1 persen mendapatkannya dari organisasi kepemudaan setempat, lalu sebanyak 49 orang responden atau sebesar 70.0 persen memperolehnya dari usaha sendiri, 3 responden atau 4.3 persen mendapatnya dari meminjam, serta sisanya sebesar 8 orang responden atau 11.4 persen memperolehnya dari lain-lain. Besarnya angka untuk asal lahan usaha dari usaha sendiri dikarenakan umumnya banyak Pedagang sektor informal ini yang melakukan usahanya memanfaatkan luas ruang terbuka umum secara cuma-cuma dengan memanfaatkan ruang yang ada. Hal ini tersaji dalam diagram Pie berikut :

Tabel 1.7

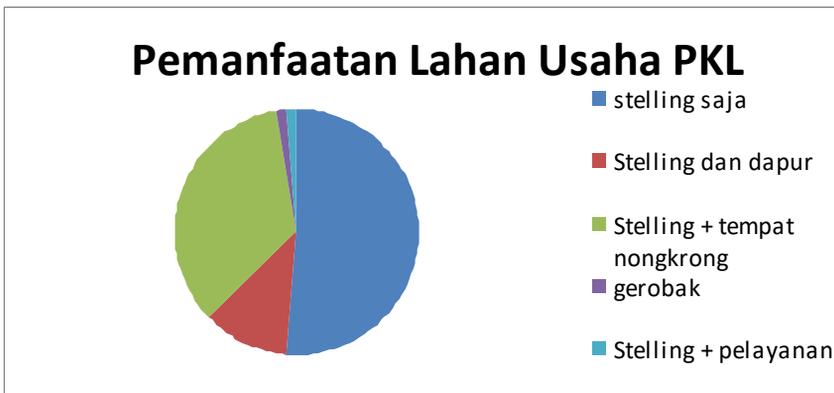


2. Untuk pertanyaan bagaimana pemanfaatan lahan oleh sektor informal,

a. Pemanfaatan Lahan Usaha PKL

Berdasarkan hasil survey pada Tabel, didapat suatu data bahwa ada sebanyak 36 orang responden atau sebesar 51.4 persen yang memanfaatkan lahan usahanya hanya dengan menempatkan stelling jualan saja, ada juga sebanyak 8 responden atau 11.4 persen yang selain menempatkan stelling juga ada dapur di lahan usahanya, sebanyak 24 responden atau 34.3 persen selain menempatkan stelling juga menjadikan lahan usahanya sebagai tempat nongkrong, 1 orang responden atau 1.4 persen menempatkan stelling sekaligus pelayanan dan sisanya sebanyak 1 responden lagi atau 1.4 persen memakai gerobak. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

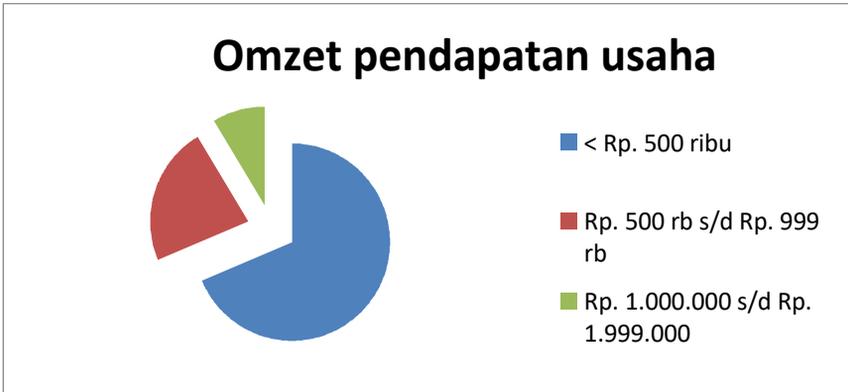
Tabel 1.8



b. Omzet Pendapatan Usaha

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 1.9 , didapat suatu data bahwa ada sebanyak 48 orang responden atau sebesar 68.6 persen yang memperoleh omzet perharinya kurang dari Rp. 500.000,- lalu ada sebanyak 16 orang responden atau 22.9 persen memperoleh omzet harian antara Rp.500.000,- sampai dengan Rp. 999.000,- dan sisanya sebesar 6 orang responden atau 8.6 persen memperoleh omzet harian antara Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 1.999.999,-. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

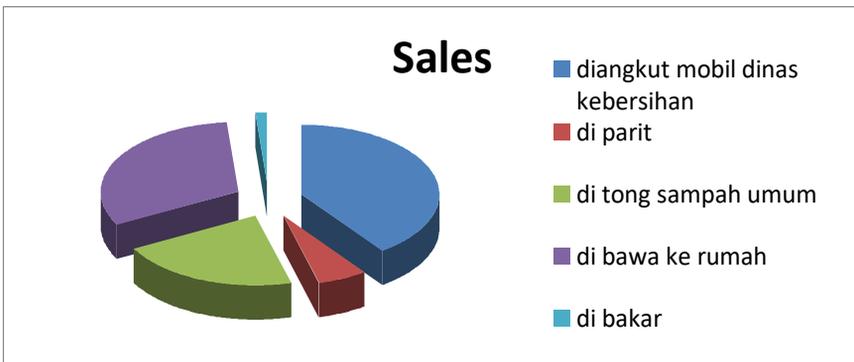
Tabel 1.9



c. Sales

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 2.0, terhadap lingkungan dengan mengambil survey terhadap tempat pembuangan limbahnya didapatkan bahwa ada sebanyak 28 orang responden atau sebesar 40.0 persen yang membuang limbahnya dengan diangkut oleh mobil dinas kebersihan pemerintah kota, ada sebanyak 4 responden atau 5.7 persen yang membuang limbahnya di parit, ada sebanyak 15 responden atau 21.4 persen yang membuang limbah usahanya di tong sampah umum, juga ada sebanyak 22 responden atau 31.4 persen yang membawa limbah usahanya ke rumah dan sisanya sebesar 1 orang responden atau 1.4 persen yang membakar limbah usahanya. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut:

Tabel 2.0

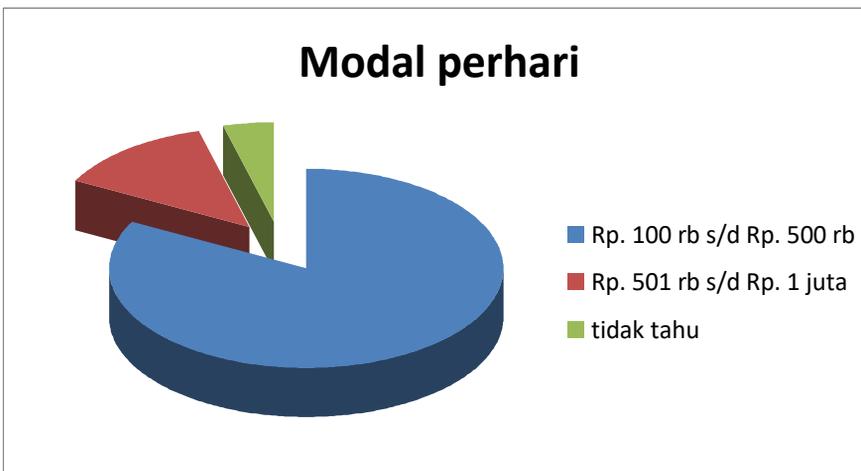


3. Untuk Pertanyaan Bagaimana Aktivitas Sektor Informal Dilakukan Di Ruang Terbuka

a. Modal Perhari

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 2.1, didapat data ada sebanyak 58 responden atau sebesar 82.9 persen bermodal usaha Rp. 100.000 sampai Rp. 500.000 perharinya, lalu ada sebanyak 9 responden atau sebesar 12.9 persen yang bermodal usaha antara Rp. 501.000 samapai dengan Rp. 1.000.000, selebihnya sebanyak 3 responden atau 4.3 persen yang tidak tahu berapa modal perharinya. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

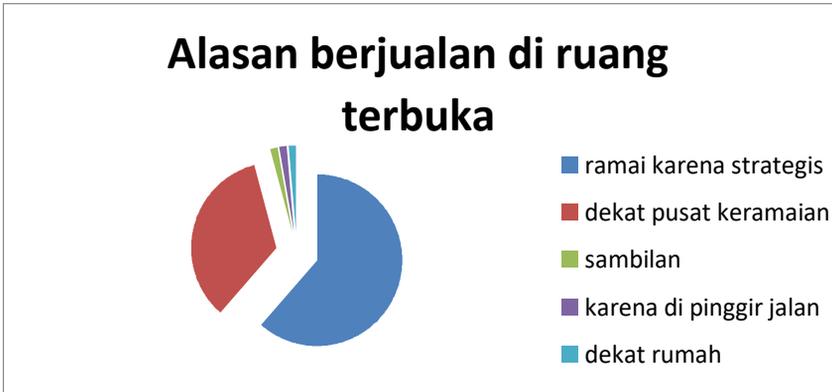
Tabel 2.1



b. Alasan Berjualan di Ruang Terbuka

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 2.2, didapatkan data bahwa ada sebanyak 43 responden atau 61.4 persen yang berjualan sektor informal ini memilih berjualan di ruang terbuka karena alasan ramai yang membeli karena tempatnya strategis, ada sebanyak 24 responden atau 34.3 persen yang beralasan dekat dengan pusat keramaian, ada 1 orang responden atau 1.4 persen yang beralasan sambilan, ada satu orang responden atau 1.4 persen dengan alasan dekat rumah dan sisanya 1 orang responden atau 1.4 persen beralasan karena di pinggir jalan. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut:

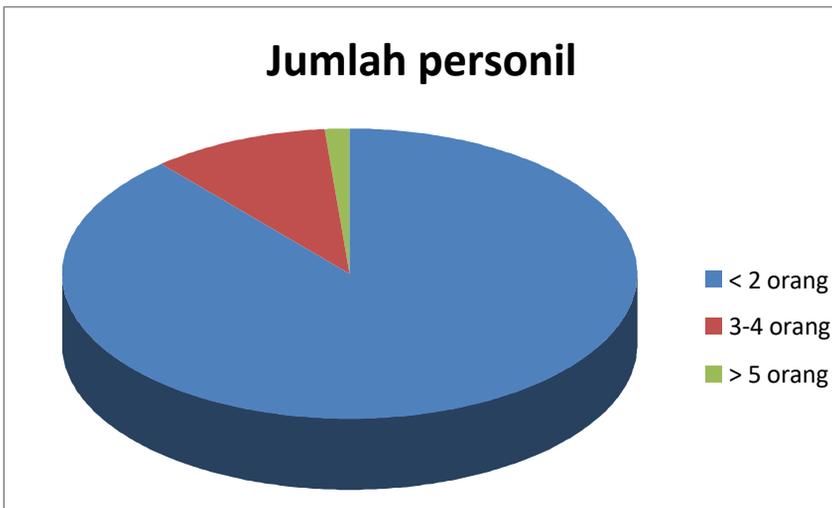
Tabel 2.2.



c. Jumlah Personil

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 2.3, didapatkan data bahwa ada sebanyak 62 responden atau 88.6 persen yang dibantu kurang dari 2 orang personil, ada sebanyak 7 responden atau sebesar 10.0 persen yang di bantu antara 3 sampai 4 personil dan hanya 1 responden atau sebesar 1.4 persen yang di bantu lebih dari 5 personil dalam melakukan usaha sektor informalnya. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

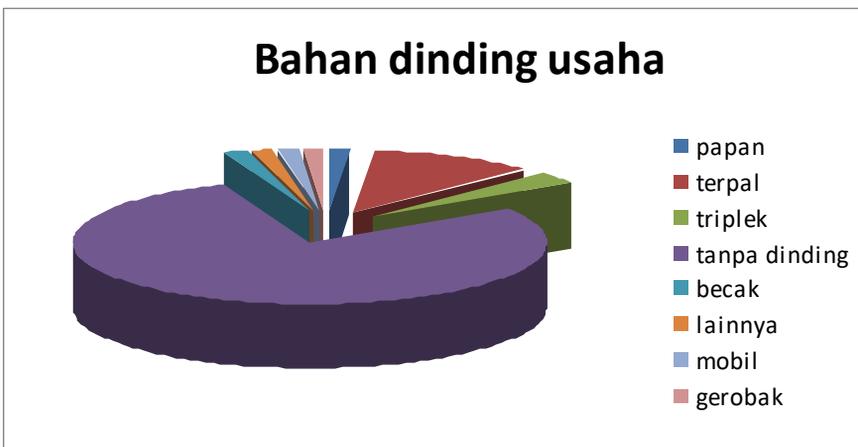
Tabel 2.3



d. Bahan Dinding Usaha

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 2.4, didapatkan data bahwa ada sebanyak 1 responden atau 1.4 persen yang berdinding papan, ada 8 responden atau sebesar 11.4 persen berdinding terpal, ada 2 responden atau 2.9 persen berdinding triplek, ada sebanyak 55 responden atau 78.6 persen yang tanpa dinding, ada 1 responden atau 1.4 persen menggunakan becak sebagai dinding usahanya, ada 1 responden atau 1.4 persen menggunakan mobil, ada 1 responden atau 1.4 persen menggunakan gerobak dan sisanya sebanyak 1 responden atau 1.4 persen lainnya. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

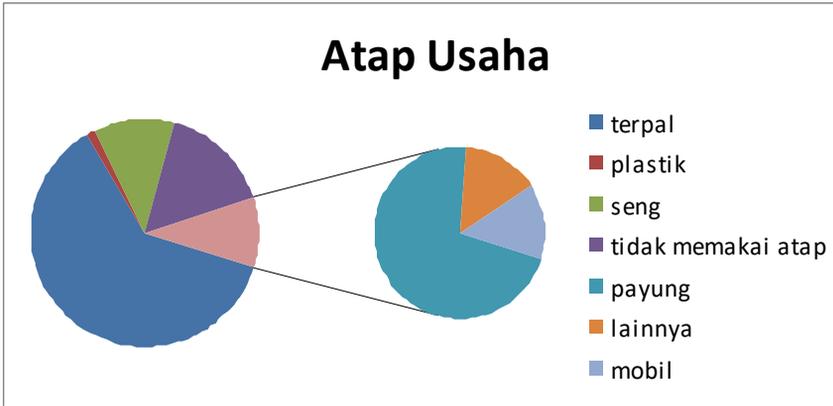
Tabel 2.4



e. Atap Usaha

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 2.5, didapatkan data bahwa ada sebanyak 43 responden atau 61.4 persen yang beratap terpal sebagai atap usahanya, ada 1 responden atau sebesar 1.4 persen beratap plastik, ada 8 responden atau 11.4 persen yang beratap seng, ada sebanyak 11 responden atau 15.7 persen yang tanpa memakai atap, ada sebanyak 5 responden atau 7.1 persen yang memakai payung sebagai atap usahanya, 1 responden atau 1.4 persen memakai mobil sebagai atapnya, serta sisanya sebanyak 1 responden atau 1.4 persen lainnya. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

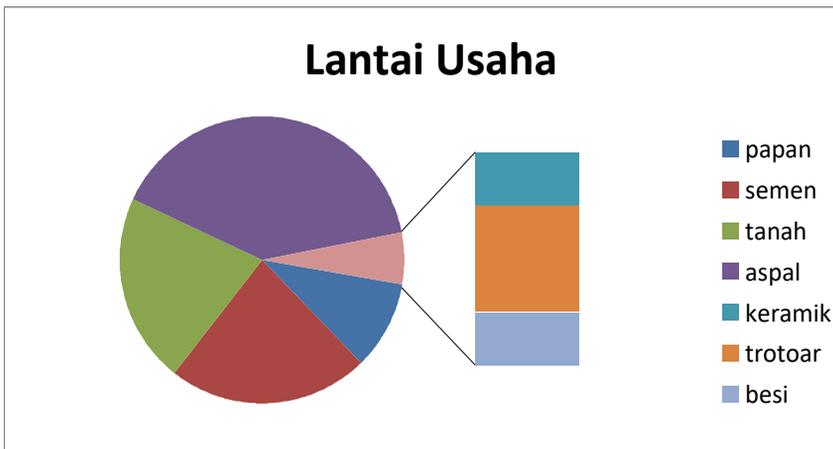
Tabel 2.5



f. Lantai Usaha

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 2.6, didapatkan data bahwa ada sebanyak 7 responden atau 10.0 persen yang berlantai papan, ada 16 responden atau sebesar 22.9 persen berlantai semen, ada 15 responden atau 21.4 persen yang berlantai tanah, ada sebanyak 28 responden atau 40.0 persen yang berlantai aspal, ada sebanyak 1 responden atau 1.4 persen yang memakai keramik sebagai lantai usahanya, 2 responden atau 2.9 persen memakai trotoar dan sisanya sebanyak 1 responden atau 1.4 persen lainnya menggunakan besi. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

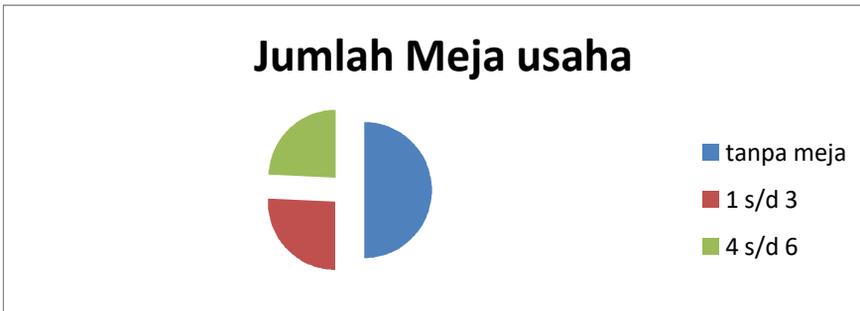
Tabel 2.6



g. Jumlah Meja Usaha

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 2.7, didapatkan data bahwa ada sebanyak 35 responden atau 50.0 persen yang tidak menggunakan meja, ada 18 responden atau 25.7 persen yang menggunakan meja sebanyak 1 samapai 3, dan 17 responden atau 24.3 persen yang memakai 4 sampai 6 meja sebagai usaha sektor informalnya. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

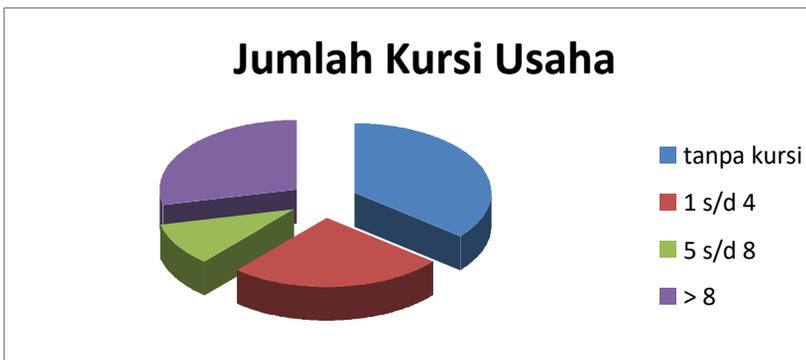
Tabel 2.7



h. Jumlah Kursi Usaha

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 2.8, didapatkan data bahwa ada sebanyak 25 responden atau 35.7 persen yang tidak menggunakan kursi, ada 18 responden atau 25.7 persen yang menggunakan kursi sebanyak 1 samapai 4, ada sebanyak 7 responden atau 10.0 persen menggunakan kursi sebanyak 5 sampai 8 dan 20 responden atau 28.6 persen yang memakai lebih dari 8 kursi sebagai usaha sektor informalnya. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

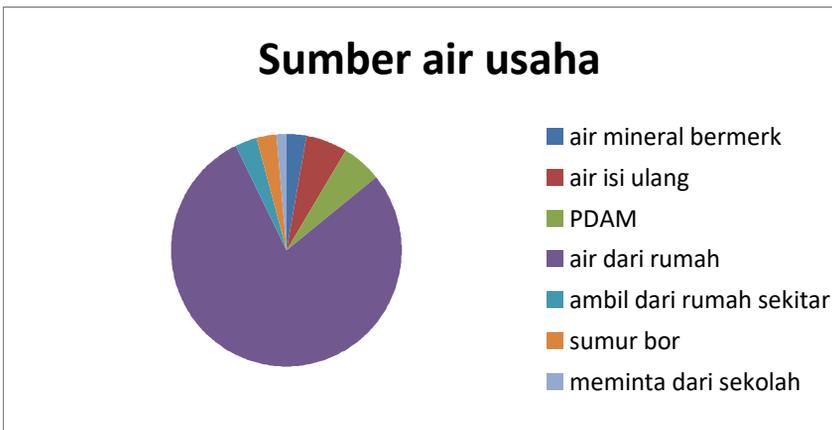
Tabel 2.8



i. Sumber Air Usaha

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 2.9, didapatkan data bahwa ada sebanyak 2 responden atau 2.9 persen yang menggunakan air mineral bermerk sebagai sumber airnya, ada 4 responden atau 5.7 persen yang menggunakan air isi ulang atau habis pakai, ada 4 responden atau 5.7 persen menggunakan air PDAM, ada 55 responden atau 78.6 persen menggunakan air yang dibawa dari rumah, ada 2 responden atau 2.9 persen mengambil dari rumah sekitar, ada 2 responden atau 2.9 persen menggunakan sumur bor dan selebihnya 1 responden atau 1.4 persen memintanya dari sekolah. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

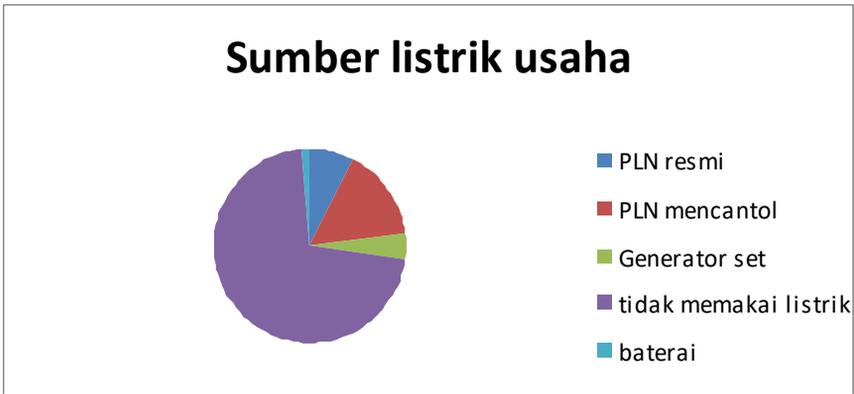
Tabel 2.9



j. Sumber Listrik Usaha

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 3.0, didapatkan data bahwa ada sebanyak 5 responden atau 7.1 persen yang menggunakan listrik resmi PLN, ada 11 responden atau 15.7 persen yang mencantol listrik, ada 3 responden atau 4.3 persen menggunakan generator set sebagai sumber listriknya, ada 50 responden atau 71.4 persen tidak memakai listrik dan 1 responden atau 1.4 persen menggunakan baterai. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

Tabel 3.0



4. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana sektor informal mendapatkan lahan usahanya

a. a. Usaha Tergabung dalam Organisasi PKL

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 3.1, didapatkan data sebanyak 15 responden atau 21.4 persen menjawab ya, sebanyak 54 responden atau 77.1 persen menjawab tidak dan selebihnya sebanyak 1 responden atau 1.4 persen menjawab tidak tahu. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

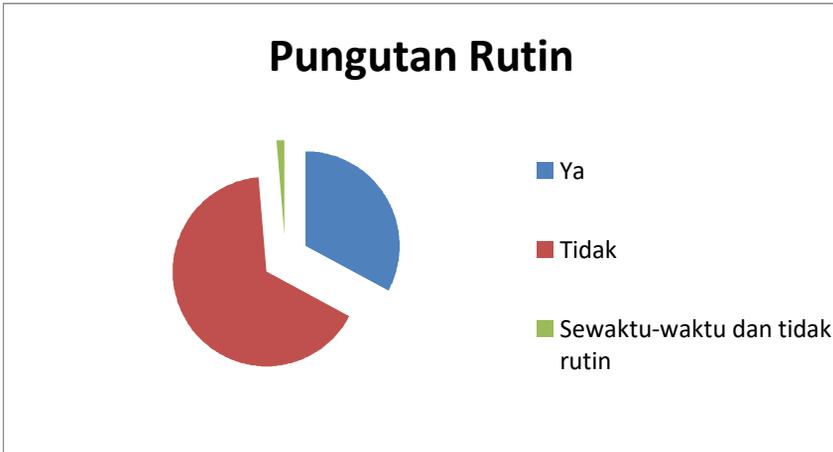
Tabel 3.1



b. b. Pungutan Rutin

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 3.2, didapatkan data sebanyak 23 responden atau 32.9 persen menjawab ya, sebanyak 46 responden atau 65.7 persen menjawab tidak dan selebihnya sebanyak 1 responden atau 1.4 persen menjawab sewaktu-waktu dan tidak rutin. Tingginya persentase yang menjawab tidak dikarenakan para pelaku usaha sektor informal tidak terbuka dalam memberikan keterangan masalah ini, hal ini di buktikan langsung oleh peneliti yang melihatnya secara langsung saat terjadinya praktek pungutan tersebut, ada beberapa sebab yang melatar belakanginya dikarenakan faktor keamanan dalam usahanya dan ada rasa takut dan tidak mau tahu sehingga menutup-nutupinya. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

Tabel 3.2

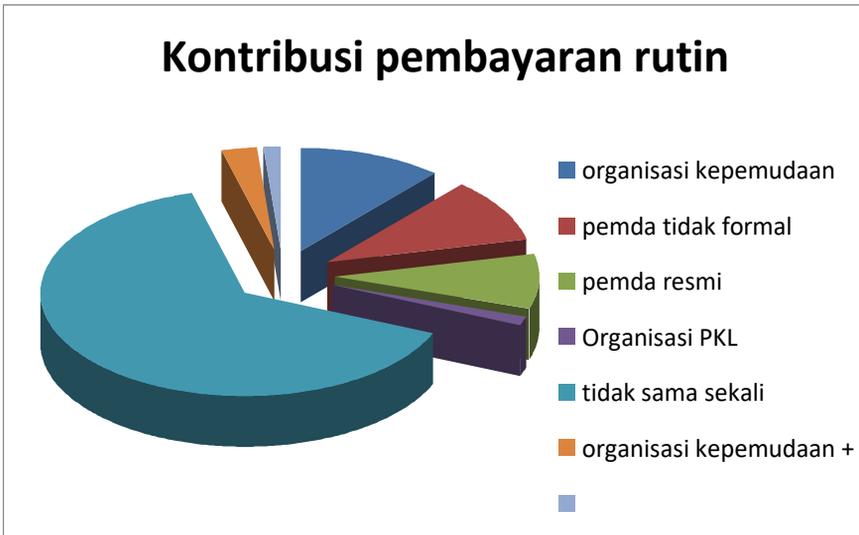


c. c. Kontribusi Pembayaran Rutin

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 3.3, didapatkan data bahwa ada sebanyak 8 responden atau 11.4 persen yang memberikannya kepada organisasi kepemudaan, 7 responden atau 10.0 persen memberikan kepada Pemda yang tidak formal, 6 responden atau 8.6 persen memberikan kepada pemda kota medan secara resmi, 1 responden atau 1.4 persen memberikan kepada organisasi atau paguyuban pedagang kaki lima, ada 45 responden atau 64.3 persen yang tidak memberikan sama sekali, 2 responden memberikan kepada organisasi kepemudaan sekaligus pemda kota medan secara resmi, dan ada 1 responden atau 1.4 persen memberikan kepada pemda yang tidak formal sekaligus pemerintah

kota medan secara resmi. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

Tabel 3.3



d. d. Kontribusi Kepada Organisasi Kepemudaan Setempat

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 3.4, didapatkan data bahwa ada sebanyak 60 responden atau 85.7 persen menyatakan tidak ada, 1 responden atau 1.4 persen memberikan Rp. 10.000 perhari, 1 responden atau 1.4 persen memberikan Rp. 15.000 perhari, 1 responden atau 1.4 persen memberikan Rp. 20.000 perhari, 1 responden atau 1.4 persen memberikan Rp. 25.000 perhari, 2 responden atau 2.9 persen memberikan Rp. 5.000 perhari, 2 responden memberikan Rp. 25.000 perbulan, 1 responden atau 1.4 persen memberikan Rp. 250.000 perbulan dan 1 responden atau 1.4 persen memberikan Rp. 50.000 perbulan. Tingginya persentase yang tidak memberikan kontribusi dikarenakan adanya ketidak jujuran responden untuk memberikan keterangan, hal ini dibuktikan oleh peneliti pada saat dilakukan survey menemukan adanya pungutan kontribusi kepada organisasi kepemudaan setempat, kecenderungan ini disebabkan para pelaku sektor informal beranggapan mengenai faktor keamanan dalam berjualan serta tidak diganggu pada saat melakukan aktifitas rutinnya. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

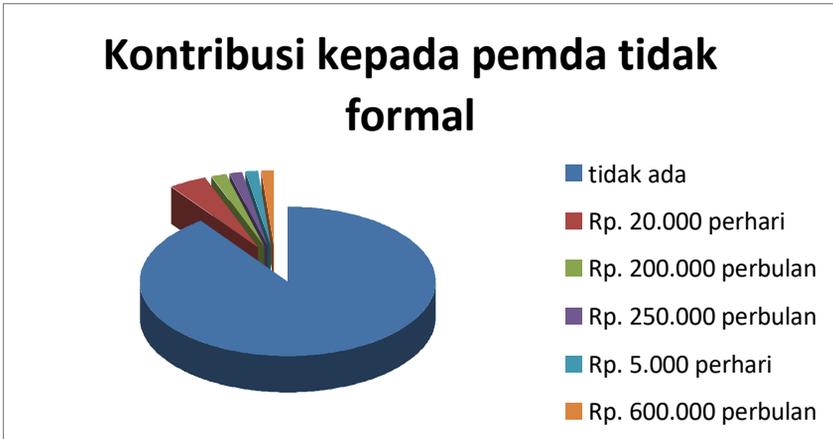
Tabel 3.4



e. e. Kontribusi Kepada Pemda Tidak Formal

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 3.5, didapatkan data bahwa ada sebanyak 63 responden atau 90.0 persen menyatakan tidak ada, 3 responden atau 4.3 persen memberikan Rp. 20.000 perhari, 1 responden atau 1.4 persen memberikan Rp. 200.000 perbulani, 1 responden atau 1.4 persen memberikan Rp. 250.000 perbulani, 1 responden atau 1.4 persen memberikan Rp. 5.000 perhari, 1 responden atau 1.4 persen memberikan Rp. 600.000 perbulan. Tingginya persentase yang tidak memberikan kontribusi dikarenakan adanya ketidak jujuran responden untuk memberikan keterangan, sama seperti pada saat peneliti menanyakan kontribusi terhadap organisasi kepemudaan, hal ini dibuktikan oleh peneliti pada saat dilakukan survey menemukan adanya pungutan kontribusi kepada pemda yang tidak formal cukup tinggi, kecenderungan ini disebabkan para pelaku sektor informal beranggapan mengenai faktor keamanan dalam berjualan serta tidak diganggu pada saat melakukan aktifitas rutinnnya. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

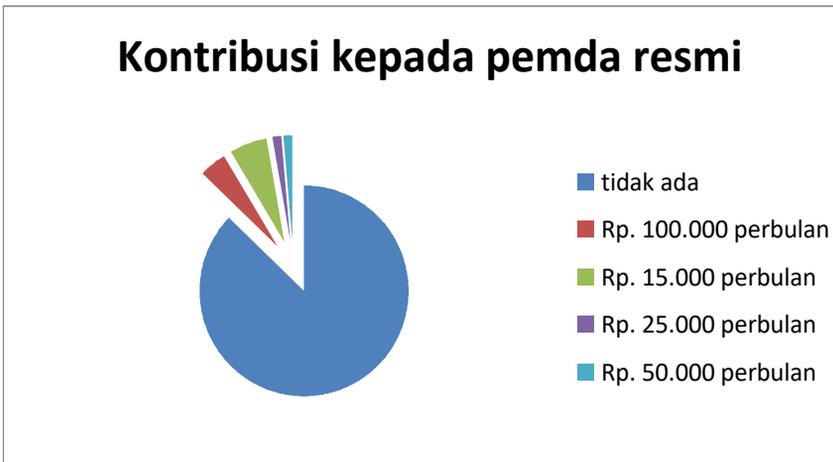
Tabel 3.5



f. f. Kontribusi Kepada Pemda Resmi

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 3.6, didapatkan data bahwa ada sebanyak 61 responden atau 87.1 persen menyatakan tidak ada, 3 responden atau 4.3 persen memberikan Rp. 100.000 perbulan, 4 responden atau 5.7 persen memberikan Rp. 15.000 perbulan, 1 responden atau 1.4 persen memberikan Rp. 25.000 perbulan, dan 1 responden atau 1.4 persen memberikan Rp. 50.000 perbulan. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

Tabel 3.6



g. g. Kontribusi Kepada Organisasi PKL

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 3.7, didapatkan data bahwa ada sebanyak 69 responden atau 98.6 persen menyatakan tidak ada dan 1 responden atau 1.4 persen menyatakan Rp. 20.000 perbulan. Hal ini tergambar dalam diagram pie berikut :

Tabel 3.7



- 1. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Kontribusi Sektor Informal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**
- 2. Untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Mengatur Sektor Informal Terhadap Tata Ruang Perkotaan**

Berdasarkan wawancara dengan Drs. Zulkarnaen Nasution, M.Si (Kepala Bappeda Kota Medan) pada bulan September 2016 menurutnya PKL sangat membantu dalam peningkatan pendapatan masyarakat Kota Medan dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang tidak tertampung di dalam sektor formal, Tetapi di dalam menata kota perlu penataan PKL sehingga tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah serta hilangnya estetika kota, disini pemerintah Kota Medan menganggap PKL sebagai mitra pemerintah yang menunjang kemajuan pembangunan kota.

Adapun menurut Kepala Satpol PP Kota Medan dengan tegas mengatakan bahwa aturan Perda Kota Medan tentang PKL masih belum bisa ditegakkan sepenuhnya, pemerintah masih mencari jalan keluar atas penataan PKL secara persuasif tanpa kekerasan atau

penggusuran. Operasi penertiban secara represif tetap kita lakukan apabila PKL telah melanggar perda.

Menurut Rustam Hakim (1987), ruang terbuka pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung kegiatan aktivitas tertentu dari warga lingkungan tersebut baik secara individu atau secara kelompok. Bentuk daripada ruang terbuka ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan. Contoh ruang terbuka adalah jalan, pedestrian, taman, plaza, pemakaman disekitar lapangan olahraga.

Sedangkan menurut Rob Krier (1979), mengklasifikasikan ruang terbuka berdasarkan bentuk fisik dan pola ruangnya, yang meliputi :

- Berbentuk memanjang, yaitu ruang terbuka yang hanya mempunyai batas-batas di sisi-sisinya, seperti jalanan, sungai dan lain-lain. Ruang terbuka berbentuk memanjang ini juga merupakan ruang-ruang sirkulasi karena dimanfaatkan untuk melakukan pergerakan oleh masyarakat sekitarnya.
- Berbentuk cluster, yaitu ruang terbuka yang mempunyai batas-batas disekelilingnya, seperti lapangan, bundaran dan lain-lain. Ruang terbuka dengan bentuk cluster ini membentuk “kantong-kantong” yang berfungsi sebagai ruang-ruang akumulasi aktivitas kegiatan masyarakat kota.

LAMPIRAN 1

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Jenis Kelamin (L/P) :
Nama Usaha :
Lokasi :
Jalan :
Kecamatan :
Kelurahan :

QUESTIONER

I. Pertanyaan di tujukan kepada Pedagang Kaki Lima

Lingkarilah Jawaban yang sesuai menurut saudara

A. CIRI-CIRI FISIK DARI PEDAGANG KAKI LIMA "KULINER"

Pertanyaan :

1. Berapa Modal perhari usaha PKL saudara ?
 - a. Rp. 100.000 s/d Rp. 500.000
 - b. Rp. 501.000 s/d Rp. 1.000.000
 - c. Rp. 1.001.000 s/d Rp. 2.000.000
 - d. Lainnya (.....)

2. Apakah alasan saudara berjualan Kaki Lima di ruang terbuka?
 - a. Ramai yang membeli karena tempatnya strategis
 - b. Dekat dengan pusat keramaian
 - c. Lainnya (.....)

3. Berapa jumlah personil terlibat dalam pelayanan PKL saudara ?
 - a. ≤ 2 Orang
 - b. 3 - 4 Orang
 - c. ≥ 5 Orang

4. Berbahan dasar apakah dinding dari usaha PKL saudara ?
 - a. Terpal
 - b. Plastik
 - c. Kain
 - d. Triplek
 - e. Tanpa dinding

- f. Lainnya (.....)
5. Berbahan dasar apakah atap dari usaha PKL saudara ?
- Terpal
 - Plastik
 - Seng
 - Tidak memakai atap
 - Lainnya (.....)
6. Berbahan dasar apakah lantai dari usaha PKL saudara ?
- Papan
 - Semen
 - Tanah
 - Aspal
 - Kramik
 - Lainnya (.....)
7. Berapakah jumlah Meja dalam usaha PKL saudara ?
- Tanpa Meja
 - 1 sampai 3
 - 4 sampai 6
 - Lebih dari 6
8. Berapakah jumlah Kursi dalam usaha PKL saudara ?
- Tanpa Kursi
 - sampai 4
 - 5 sampai 8
 - Lebih dari 8
9. Darimanakah sumber air yang saudara gunakan untuk usaha PKL ?
- Dari air mineral bermerk
 - Dari air isi ulang (habis pakai)
 - Dari air PDAM
 - Dari air yang dibawa dari rumah
 - Lainnya (.....)
10. Darimana Sumber Penerangan (Listrik) yang digunakan usaha PKL ?
- Dari PLN resmi
 - Dari PLN “mencantol listrik”

- c. Dari Generator Set
- d. Tidak memakai Listrik

B. TIPOLOGI DARI PEMANFAATAN LAHAN SEKTOR INFORMAL

Pertanyaan

1. Apakah status lahan usaha PKL saudara ?
 - a. Sewa
 - b. Pinjam pakai
 - c. Turun temurun
 - d. Lainnya (.....)

2. Bagaimanakah Peruntukan Lahan dalam usaha PKL saudara ?
 - a. Lahan berjualan Makanan saja
 - b. Lahan berjualan Minuman saja
 - c. Lahan untuk berjualan Makanan dan Minuman sekaligus dapur pengolahannya
 - d. Lainnya (.....)

3. Bagaimanakah bentuk fisik usaha PKL saudara ? (di perlukan foto)
 - a. Usaha terbuka
 - b. Setengah permanen terbuka
 - c. Tertutup
 - d. Memakai Tenda bongkar pasang

4. Dimanakah letak lokasi berjualan PKL saudara ? (diperlukan foto)
 - a. Di pinggir jalan
 - b. Di atas trotoar
 - c. Di atas parit
 - d. Di lapangan
 - e. Di taman

5. Kapanakah waktu anda berjualan PKL ?
 - a. Pagi hari saja

- b. Pagi sampai Malam
 - c. Malam hari saja
 - d. Malam sampai pagi
 - e. Siang sampai malam
6. Berapakah luas lahan yang digunakan dalam usaha PKL saudara ?
- a. $2 M^2$ sd $4 M^2$
 - b. $5 M^2$ sd $7 M^2$
 - c. $8 M^2$ sd $10 M^2$
 - d. $> 10 M^2$
7. Darimanakah lahan usaha PKL saudara peroleh ?
- a. Dari Keluarga
 - b. Dari aparat pemerintah
 - c. Dari organisasi kepemudaan setempat
 - d. Dari usaha sendiri
 - e. Lainnya (.....)

C. PEMANFAATAN LAHAN OLEH SEKTOR INFORMAL

Pertanyaan

1. Bagaimanakah pemanfaatan lahan usaha PKL saudara ?
- a. Stelling saja
 - b. Stelling dan dapur
 - c. Stelling dan sekaligus tempat nongkrong
 - d. Stelling dan juga pelayanan
2. Berapakah omzet pendapatan dari hasil saudara berjualan PKL perharinya ?
- a. ≤ 500 ribu
 - b. 500 ribu s/d 999 ribu
 - c. 1.000.000 s/d 1.999.000
 - d. $\geq 2.000.000$

3. Kontribusi limbah PKL terhadap lingkungan, dimanakah saudara membuang limbah dari usaha PKL ?
 - a. Diangkut mobil dinas kebersihan
 - b. Di parit
 - c. Di tong sampah umum
 - d. Dibawa ke rumah
 - e. Dibiarkan di jalan

D. KONTRIBUSI SEKTOR INFORMAL TERHADAP ORGANISASI KEPEMUDAAN ; PEMDA YANG TIDAK FORMAL ; PEMERINTAH KOTA MEDAN (FORMAL); DAN ORGANISASI/PAGUYUBAN PKL

Pertanyaan

1. Apakah usaha PKL saudara tergabung dalam organisasi/paguyuban PKL ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Terkadang ikut terkadang tidak
 - d. Tidak tahu

2. Apakah dalam usaha PKL saudara dikenakan pungutan rutin?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Sewaktu-waktu dan tidak rutin

3. Kepada siapa saudara memberikan kontribusi pembayaran rutin ?
 - a. Kepada organisasi kepemudaan
 - b. Kepada Pemda yang tidak formal
 - c. Kepada Pemda Kota Medan secara resmi
 - d. Kepada organisasi/paguyuban PKL
 - e. Kepada Semuanya (a,b,c,d)
 - f. Tidak sama sekali

4. Berapa besaran kontribusi pembayaran rutin PKL saudara kepada organisasi kepemudaan (jika ada) ?
 - a. Rp. /hari
 - b. Rp. /minggu
 - c. Rp. /bulan
 - d. Rp. /tahun

5. Berapakah besaran kontribusi pembayaran rutin PKL saudara kepada pemda yang tidak formal (jika ada) ?
 - a. Rp. /hari
 - b. Rp. /minggu
 - c. Rp. /bulan
 - d. Rp. /tahun

6. Berapakah besaran kontribusi pembayaran rutin PKL saudara kepada pemda Kota Medan secara resmi (jika ada) ?
 - a. Rp. /hari
 - b. Rp. /minggu
 - c. Rp. /bulan
 - d. Rp. /tahun

7. Berapakah besaran dari kontribusi pembayaran rutin PKL saudara kepada organisasi/paguyuban PKL (jika ada) ?
 - a. Rp. /hari
 - b. Rp. /minggu
 - c. Rp. /bulan
 - d. Rp. /tahun

II. Pertanyaan ditujukan kepada Masyarakat Pengguna Jasa Pedagang Kaki Lima

A. IMPLIKASI KEBERADAAN SEKTOR INFORMAL TERHADAP MASYARAKAT

Pertanyaan

1. Bagaimanakah persepsi saudara terhadap keberadaan PKL ?
 - a. Sangat bermanfaat
 - b. Bermanfaat
 - c. Tidak bermanfaat
 - d. Sangat tidak bermanfaat
 - e. Tidak tahu

2. Apakah usaha PKL menurut saudara mengganggu tata kota ?
 - a. Mengganggu
 - b. Tidak mengganggu
 - c. Tidak tahu

3. Dampak utama apa yang terjadi menurut saudara dengan keberadaan PKL ?
 - a. Menimbulkan kemacetan
 - b. Menimbulkan kekotoran
 - c. Menimbulkan banjir
 - d. Lingkungan tidak sehat
 - e. Terjadi polusi/ dan kegaduhan
 - f. Lainnya (.....)

4. Sebaiknya menurut saudara, apa yang harus dilakukan terhadap PKL ?
 - a. Di relokasi
 - b. Di biarkan saja
 - c. Tidak tahu
 - d. Lainnya (.....)

B. IMPLIKASI KEBERADAAN SEKTOR INFORMAL TERHADAP RUANG TERBUKA DI KOTA MEDAN

Pertanyaan

1. Bagaimana dampak keberadaan PKL terhadap keindahan kota ?
 - a. Merusak keindahan kota
 - b. Tidak merusak keindahan kota
 - c. Tidak tahu
 - d. Lainnya (.....)

2. Bagaimana dampak keberadaan PKL terhadap ketertiban kota ?
 - a. Mengganggu ketertiban kota
 - b. Tidak mengganggu ketertiban kota
 - c. Tidak tahu
 - d. Lainnya (.....)

3. Bagaimana dampak keberadaan PKL terhadap kebersihan kota ?
 - a. Mengganggu kebersihan kota
 - b. Tidak mengganggu kebersihan kota
 - c. Tidak tahu
 - d. Lainnya (.....)

4. Bagaimana dampak keberadaan PKL terhadap kemacetan kota ?
 - a. Menjadi penyebab kemacetan kota
 - b. Tidak berdampak pada kemacetan kota
 - c. Tidak tahu
 - d. Lainnya (.....)

5. Bagaimana dampak keberadaan PKL terhadap kenyamanan kota ?
 - a. Menjadi penyebab ketidaknyamanan kota
 - b. Tidak berdampak pada kenyamanan kota

- c. Tidak tahu
 - d. Lainnya (.....)
6. Bagaimana dampak keberadaan PKL terhadap polusi kota ?
- a. Menjadi penyebab terjadinya polusi kota
 - b. Tidak berdampak pada terjadinya polusi kota
 - c. Tidak tahu
 - d. Lainnya (.....)
7. Apakah keberadaan PKL menjadikan konflik dengan Masyarakat ?
- e. Menjadi penyebab terjadinya konflik
 - f. Tidak berdampak pada terjadinya konflik
 - g. Tidak tahu
 - h. Lainnya (.....)

**DAFTAR PERTANYAAN
DEEP INTERVIEW**

1. Bagaimana pendapat saudara tentang pengaruh PKL terhadap kemacetan kota ?
2. Bagaimana pendapat saudara terhadap keamanan, keindahan, kenyamanan, kerapihan, kekeluargaan (5K) kota Medan dengan keberadaan PKL ?
3. Tergangguakah saudara dengan keberadaan PKL ?

Sumber Interview berasal dari

1. Kepala Bappeda Kota Medan
2. Kepala Satpol PP Kota Medan
3. Supir Taxi Blue Bird (2 orang)
4. Tukang Becak (2 orang)
5. Masyarakat umum (Pengguna fasilitas umum masing-masing 2 orang)
6. Masyarakat sekitar PKL tempat penelitian (2 orang)
7. Supir kendaraan angkutan kota (2 orang)

LAMPIRAN 2

Frequency Table

	Nama	Frequency	Percent
Valid	Abdul Afit	1	1.4
	Ahmad	1	1.4
	Aisyah	1	1.4
	Akbar	1	1.4
	Ali	1	1.4
	Along	1	1.4
	Amri	1	1.4
	Andre	1	1.4
	Ardi	1	1.4
	Asni	1	1.4
	Ati	1	1.4
	Darmawati	1	1.4
	Deswita Sari	1	1.4
	Dewi	1	1.4
	Edi	1	1.4
	Elda	1	1.4
	Endang	1	1.4
	Ernawati	1	1.4
	Evika	1	1.4
	Febri	1	1.4
	Fitri	3	4.3
	Hamzah	1	1.4
	Hendra	1	1.4
	Hermansyah	1	1.4
	Hotna Simanula	1	1.4
	Ibu Yus	1	1.4
	Ilda Lestari	1	1.4
	Juli	1	1.4
	Khaidir	1	1.4
	Lina	1	1.4
	M. Habibi	1	1.4
	Mama Deta	1	1.4
Mama Helmi	1	1.4	
Masriana	1	1.4	
Muhammad Zaka	1	1.4	

Nenek Molen	1	1.4
Ngadiyo	1	1.4
Nunung	1	1.4
Nuraini	1	1.4
Nurhalimah	1	1.4
Pak Ginting	1	1.4
Parman	1	1.4
Rena	1	1.4
Rian	1	1.4
Ridwan	1	1.4
Rizki	1	1.4
Sari	1	1.4
Siman	1	1.4
Sokar	1	1.4
Sopian	1	1.4
Sudimin	1	1.4
Sumiati	1	1.4
Suparno	1	1.4
Suriati	1	1.4
Sutikno	1	1.4
Suyanti	1	1.4
Syamsiah	1	1.4
Syamsul Akmal	1	1.4
Tejo	1	1.4
Tia	1	1.4
Tisam	1	1.4
Uci	1	1.4
Uli	1	1.4
Umar Ali	1	1.4
Wandi	1	1.4
Wati	1	1.4
Watini	1	1.4
Yuli	1	1.4
Total	70	100.0

Jenis_Kelamin	Frequency	Percent
Laki-Laki	31	44.3
Perempuan	39	55.7
Total	70	100.0

Nama_Usaha	Frequency	Percent
Ayam Goreng	1	1.4
Ayam Penyet	2	2.9
Bakso	1	1.4
Bakso Bakar	1	1.4
Bakso Bakar & Batagor	1	1.4
Batagor	4	5.7
Brownies Amanda	1	1.4
Burger	1	1.4
Burger & Es Tebu	1	1.4
Es Buah	1	1.4
Es Campur	1	1.4
Es Dawet	2	2.9
Es Dogger	1	1.4
Es Durian	1	1.4
Es Jagung	1	1.4
Es Jeruk	2	2.9
Es Kelapa	4	5.7
Es Tebu	4	5.7
Fourty Eight	1	1.4
Gorengan	3	4.3
Gorengan, Minuman, Rokok	1	1.4
Jual Makanan (Lauk pauk)	1	1.4
Jualan Molen, Tela-Tela	1	1.4
Jualan Rujak	1	1.4
Keripik	1	1.4
Kolak Durian	2	2.9
Kue	1	1.4
Lemang	1	1.4
Makanan & Minuman	2	2.9

Makanan Ringan, Indomie, Soto, Nasgor	1	1.4
Martabak	1	1.4
Martabak Mini	1	1.4
Mie & Gorengan	1	1.4
Mie Ayam	2	2.9
Mie Ayam Bakso	3	3.3
Mie goreng, Gorengan dan Minum	1	1.4
Minuman Pop Ice	1	1.4
Molen	3	4.3
Pecal	1	1.4
Piscok	1	1.4
Pokat Kocok	1	1.4
Roti	1	1.4
Rujak	2	2.9
Sarapan Pagi	1	1.4
Sate	1	1.4
Sup Buah	1	1.4
Taiso	1	1.4
Warkop	1	1.4
Total	70	100.0

Lokasi	Frequency	Percent
Depan FK USU	1	1.4
Depan RS. USU	2	2.8
Depan SD Negeri	1	1.4
Pajak Sore	1	1.4
Pasar Melati	9	12.8
Pinggir Jalan Dr. Mansyur	1	1.4
Pinggir Jalan Setia Budi	7	10
Pinggir Jalan Abdul Hakim	2	2.8
Pinggir Jalan Iskandar Muda	1	1.4
Pinggir Jalan K.H. Wahid hasyim	3	4.2
Pinggir Jalan Sei Mencirim	3	4.2
Pinggir Jalan Gatot Subroto	1	1.4
Pinggir Jalan Berdikari	1	1.4
Pinggir Jalan Sei Musi	2	2.8

Pinggir Jalan Amal	1	1.4
Pinggir Jalan Industri Ringroad	2	2.8
Pinggir Jalan Sunggal	2	2.8
Pinggir Jalan bunga raya	1	1.4
Pinggir Jalan TB. Simatupang	4	5.6
Pinggir Jalan Glugur	2	2.8
Pinggir Jalan T. Amir Hamzah	5	7.1
Pinggir Jalan Kapten Muslim	3	4.2
Pintu 1 USU	1	1.4
Pintu 4 USU	4	5.6
Sumber	9	12.8
USU	1	1.4
Total	70	100.0

Jalan	Frequency	Percent
Jl. Abdul Hakim	2	2.9
Jl. Amal	1	1.4
Jl. Berdikari	1	1.4
Jl. Bunga Raya	1	1.4
Jl. Dr. Mansyur	11	15.7
Jl. Flamboyan	3	4.3
Jl. Flamboyan raya	7	10.0
Jl. Gatot Subroto	1	1.4
Jl. Glugur	2	2.9
Jl. Industri Ringroad	2	2.9
Jl. Iskandar Muda	2	2.9
Jl. Jamin Ginting	9	12.9
Jl. K.H. Wahid Hasyim	2	2.9
Jl. Kapten	1	1.4
Jl. Kapten Muslim	2	2.9
Jl. Setia Budi	7	10.0
Jl. Sunggal	1	1.4
Jl. Sunggal Pekan	1	1.4
Jl. T. Amir Hamzah	5	7.1
Jl. TB. Simatupang	4	5.7
Sei Mencirim	3	4.3
Sei Musi	2	2.9
Total	70	100.0

Kecamatan	Frequency	Percent
Medan Barat	3	4.3
Medan Baru	29	41.4
Medan Helvetia	7	10.0
Medan Petisah	1	1.4
Medan Selayang	6	8.6
Medan Sunggal	14	20.0
Medan Tuntungan	10	14.3
Total	70	100.0

keluarahan	Frequency	Percent
Asam Kumbang	1	1.4
Babura	7	10.0
Dwikora	3	4.3
Helvetia Tengah	2	2.9
Padang Bulan	20	28.6
PB. Selayang	1	1.4
Sei Agul	3	4.3
Sei Kambing	2	2.9
Sei Sikambing	1	1.4
Sunggal	8	11.4
Sunggal Kanan	2	2.9
Tanjung Rejo	5	7.1
Tanjung Sari	5	7.1
Tanjung Selamat	10	14.3
Total	70	100.0

Modal_perhari	Frequency	Percent
Rp. 100.000 s/d Rp. 500.000	58	82.9
Rp. 501.000 s/d Rp. 1.000.000	9	12.9
Tidak Tahu	3	4.3
Total	70	100.0

Alasan_berjualan_di_ruang_terbuka	Frequency	Percent
Ramai yang membeli karena tempatnya strategis	43	61.4
Dekat dengan pusat keramaian	24	34.3
Sambilan	1	1.4
Dekat dengan rumah	1	1.4
karena dipinngir jalan	1	1.4
Total	70	100.0

Jumlah_Personil	Frequency	Percent
< 2 Orang	62	88.6
3-4 Orang	7	10.0
> 5 Orang	1	1.4
Total	70	100.0

Bahan_Dinding_Usaha	Frequency	Percent
Papan	1	1.4
Terpal	8	11.4
Triplek	2	2.9
Tanpa dinding	55	78.6
Becak	1	1.4
Lainnya	1	1.4
Mobil	1	1.4
Gerobak	1	1.4
Total	70	100.0

Bahan_Atap_Usaha	Frequency	Percent
Terpal	43	61.4
Plastik	1	1.4
Seng	8	11.4
Tidak Memakai Atap	11	15.7
Payung	5	7.1
Lainnya	1	1.4
Mobil	1	1.4
Total	70	100.0

Bahan_Lantai_Usaha	Frequency	Percent
Papan	7	10.0
Semen	16	22.9
Tanah	15	21.4
Aspal	28	40.0
Keramik	1	1.4
Trotoar	2	2.9
Besi	1	1.4
Total	70	100.0

Jumlah_Meja_Usaha	Frequency	Percent
Tanpa meja	35	50.0
1 sampai 3	18	25.7
4 sampai 6	17	24.3
Total	70	100.0

Jumlah_Kursi_Usaha	Frequency	Percent
Tanpa kursi	25	35.7
1 sampai 4	18	25.7
5 sampai 8	7	10.0
Lebih dari 8	20	28.6
Total	70	100.0

Sumber_Air_Usaha	Frequency	Percent
Dari air mineral bermerk	2	2.9
Dari air isi ulang (habis pakai)	4	5.7
Dari air PDAM	4	5.7
Dari air yang dibawa dari rumah	55	78.6
Ambil Di rumah Sekitar	2	2.9
Sumur bor	2	2.9
Meminta Dari Sekolah	1	1.4
Total	70	100.0

Sumber_Listrik_Usaha	Frequency	Percent
Dari PLN resmi	5	7.1
Dari PLN "mencantol listrik"	11	15.7
Dari generator set	3	4.3
Tidak memakai listrik	50	71.4
Batrei	1	1.4
Total	70	100.0

Status_Lahan_Usaha	Frequency	Percent
Sewa	30	42.9
Pinjam pakai	20	28.6
Turun Menurun	3	4.3
Ambil lapak sendiri	6	8.6
Lainnya	7	10.0
Pakai Saja	4	5.7
Total	70	100.0

Peruntukan_lahan_Uasaha	Frequency	Percent
Lahan berjualan makanan saja	34	48.6
Lahan berjualan minuman saja	23	32.9
lahan untuk berjualan makanan dan minuman sekaligus dapur pengolahanya	13	18.6
Total	70	100.0

Bentuk_Fisik_Usaha	Frequency	Percent
Usaha terbuka	54	77.1
Setengah permanen terbuka	6	8.6
Memakai tenda bongkar pasang	10	14.3
Total	70	100.0

Letak_Lokasi_Usaha	Frequency	Percent
Di pinggir jalan	49	70.0
Di atas trortoar	17	24.3
Di atas parit	4	5.7
Total	70	100.0

Waktu_Berjualan	Frequency	Percent
pagi hari saja	4	5.7
Pagi sampai malam	25	35.7
Malam hari saja	2	2.9
Siang sampai malam	39	55.7
Total	70	100.0

Luas_Lahan_usaha	Frequency	Percent
2 M persegi s/d 4 M persegi	50	71.4
8 M persegi s/d 10 M persegi	2	2.9
>10 M persegi	18	25.7
Total	70	100.0

Asal_Lahan_Usaha	Frequency	Percent
Dari keluarga	5	7.1
Dari organisasi kepemudaan setempat	5	7.1
Dari usaha sendiri	49	70.0
Lainnya	8	11.4
Minjam	3	4.3
Total	70	100.0

Pemanfaatan_Lahan_usaha	Frequency	Percent
Stelling saja	36	51.4
Stelling dan dapur	8	11.4
Stelling sekaligus tempat nongkrong	24	34.3
Stelling dan juga pelayanan	1	1.4
Gerobak	1	1.4
Total	70	100.0

Omset_Pendapatan_Usaha	Frequency	Percent
< 500 Rb	48	68.6
500 RB s/d 999 RB	16	22.9
1.000.000 s/d 1.999.000	6	8.6
Total	70	100.0

Tempat Pembuangan Limbah	Frequency	Percent
Diangkut mobil dinas kebersihan	28	40.0
Di parit	4	5.7
Di tong sampah umum	15	21.4
Di bawa kerumah	22	31.4
Di bakar	1	1.4
Total	70	100.0

Usaha tergabung dalam organisasi PKL	Frequency	Percent
Ya	15	21.4
Tidak	54	77.1
Tidak tahu	1	1.4
Total	70	100.0

Adakah Pungutan rutin	Frequency	Percent
Ya	23	32.9
Tidak	46	65.7
Sewaktu-waktu dan tidak rutin	1	1.4
Total	70	100.0

Kepada siapa Memberikan Kontribusi pembayaran rutin	Frequency	Percent
Kepada organisasi kepemudaan	8	11.4
Kepada PEMDA yang tidak formal	7	10.0
Kepada PEMDA kota Medan secara resmi	6	8.6
Kepada Organisasi/paguyuban PKL	1	1.4
Tidak sama sekali	45	64.3
Kepada (a & c)	2	2.9
kepada (b & c)	1	1.4
Total	70	100.0

Jumlah_kontribusi_Kepada_Organisasi_Kepemudaan	Frequency	Percent
Tidak Ada	60	85.7
Rp. 10.000/hari	1	1.4
Rp. 15.000/hari	1	1.4
Rp. 20.000/ Hari	1	1.4
Rp. 20.000/hari	1	1.4
Rp. 25.000/bulan	2	2.9
Rp. 250.000/bulan	1	1.4
Rp. 5.000/hari	2	2.9
Rp. 50.000/bulan	1	1.4
Total	70	100.0

Jumlah_Kontribusi_Kepada_Pemda_Tidak_Formal	Frequency	Percent
Tidak Ada	63	90.0
Rp. 20.000/hari	3	4.3
Rp. 200.000/bulan	1	1.4
Rp. 250.000/bulan	1	1.4
Rp. 5.000/hari	1	1.4
Rp. 600.000/bulan	1	1.4
Total	70	100.0

Jumlah_Kontribusi_Kepada_Pemda_Resmi	Frequency	Percent
Tidak Ada	61	87.1
Rp. 100.000/bulan	3	4.3
Rp. 15.000/bulan	4	5.7
Rp. 25.000/bula	1	1.4
Rp. 50.000/bulan	1	1.4
Total	70	100.0

Jumlah_Kontribusi_Kepada_Organisasi	Frequency	Percent
Tidak Ada	69	98.6
Rp. 20.000/bulan	1	1.4
Total	70	100.0

•

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyebab PKL dianggap sebagai masalah yang mengganggu lingkungan, meskipun kegiatan tersebut merupakan alternative kegiatan mata pencaharian, adalah karena:
 - a. Perilaku berusaha para PKL yang profilnya dilihat dari segi pendidikan formal dan keahlian berusaha dipandang belum memadai dalam menginternalisasikan prinsip-prinsip dan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan;
 - b. Rencana Tata Ruang Kota sejak awal tidak memberi ruang untuk mengalokasikan tempat bagi usaha PKL, sehingga ketika para PKL dengan “inisiatif sendiri” menempati ruang-ruang tertentu sebagai tempat usahanya, hal itu secara langsung menimbulkan masalah keuangan.
 - c. Belum adanya kebijakan Pemerintah Kota Medan yang komprehensif untuk menata para PKL sebagai bagian terintegrasi pembangunan ekonomi Kota Medan, sehingga posisi para PKL secara langsung maupun tidak langsung terkondisi secara marjinal.
2. Pemberdayaan usaha PKL belum optimal dilakukan. Untuk memberdayakan para PKL itu sendiri maupun dalam penataan pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah tempat usahanya sudah tersedia, namun karena prosen pembentukan berbagai aturan dan kebijakan mengenai PKL tidak dilakukan secara partisipatif, maka kebijakan mengenai para PKL belum memadai mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan para PKL.
3. Konsep penataan pemanfaatan ruang terbuka yang berwawasan lingkungan dapat dibangun dalam perspektif sistem pengelolaan kehidupan nasional (sisnas). Tujuan pengaturan PKL di Kota Medan yang sejak awal memandang PKL sebagai asset ekonomi Kota Medan, proses pembentukan aturan dan kebijakan yang partisipatif, akan menghasilkan penataan pemanfaatan dan penguasaan tanah yang berwawasan lingkungan jika konsisten dibangun sesuai

tahapan dalam sistem pengelolaan kehidupan nasional di tingkat Pemerintahan Kota Medan.

B. Saran

1. Penanganan PKL harus dipandang sebagai bagian terintegrasi dari kegiatan ekonomi. Dalam pada itu, dipandang perlu untuk melakukan upaya “legalisasi” keberadaan PKL secara bertahap ke dalam sektor formal, misalnya melalui instrument perijinan dan pemberian kesempatan peningkatan permodalan bagi para PKL. Untuk mendukung hal itu, kiranya juga perlu segera dibangun Sistem Informasi PKL yang komprehensif agar secara cepat dapat diketahui kondisi PKL bagi para pengambil keputusan. Disamping itu, peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang lebih mengakomodasikan kepentingan PKL;
2. Proses pembentukan berbagai aturan dan kebijakan mengenai PKL seyogianya dilakukan secara partisipatif, agar lebih dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kepentingan para PKL. Oleh karena itu, proses pembentukan berbagai aturan dan kebijakan di tingkat Pemerintah Kota Medan harus melalui konsultasi yang intensif, sehingga dapat mengumpulkan berbagai aspirasi para *stakeholders*, khususnya pada PKL secara optimal. Disamping itu, peran pemerintah sebagai pamong dan pengayom yang sifatnya membina perlu ditumbuhkan agar kondisi yang partisipatif dapat terwujud.
3. Profil para PKL yang belum secara serta merta menginternalisasi prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam kegiatan usahanya mengharuskan Pemerintah Kota Medan memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pengembangan kapasitas (*capacity building*) bagi para PKL, seperti: peningkatan cara menyediakan makanan yang sehat dan menarik, peningkatan cara membuat sayur mayor serta buah-buahan yang sehat dan relatif awet, dan peningkatan kemampuan untuk mengakses lembaga penyedia modal.

•

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. *Kemiskinan Global Diabaikan. Kompas*. Edisi Tanggal 17 September 2005.
- Budihardjo, Eko. *Tata Ruang Perkotaan*. Alumni. Bandung. 1997
- Dayat Limbong, *Penataan Lahan Usaha K-5 : Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*, Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Effendi, Tadjuddin Noer. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta. 1995.
- Herlianto. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Alumni. Bandung. 1986.
- Hidayat. *Menuju Kebijakan Tepat Guna dalam Menunjang Peranan Sektor Informal*, Makalah yang dipresentasikan pada Seminar di Jakarta. Tanggal 15-18 Oktober 1986.
- Jhonson, Doyle Paul, (1988). *Teori Sosiologi, Klasik dan modern*, Di Indonesia kan oleh : Robert M. Z. Lawang, Jakarta, Gramedia.
- Nasution M. Arif, *Ekonomi Pinggiran Dinamika Konseptual Sektor Informal di Perkotaan*. USU Press. Medan. 2006
- Manning, Chris, Tadjudin Noer Effendi. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 1991.
- Moerdjono. *Dampak Kebijakan Penataan Lingkungan Terhadap Kegiatan Sektor Informal (Pedagang Kaki Lima) di Kotamadya Surakarta dan Kotamadya Yogyakarta*. Desertasi. Tidak dipublikasikan. Universitas Indonesia. Jakarta. 1999.
- Pemko Medan. *Pola Dasar Pembanguna Kota Medan, Tahun 2001-2005*. Pemko Medan 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982.

PKL. *Benang Kusut Yang Hilang Ujungnya*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/02/lapsu01.htm>

Pengembangan Sektor Informal, http://www.cpps.or.id/upload/policy_brief_sektor_informal.pdf.

•

RIWAYAT PENULIS

Buku ini menggambarkan dilematika ruang publik yang semakin amburadul bahkan nyaris tak bersisa dikarenakan penataan tata ruang kota yang belum maksimal di pemerintahan Kota Medan, Sumatera Utara. Hal ini tentu saja membuat hak-hak publik atas kenyamanan ruang hijau kota tergadaikan. Taman Kota yang dialihfungsikan secara ilegal, masyarakat penjalan kaki yang semakin terpinggirkan karena lahan yang terpakai oleh sektor informal pedagang kaki lima serta trotoar dan saluran yang tertutupi oleh sampah dari para pelaku sektor informal yang kerap sebagai pemicu banjir, merupakan salah satu dari beragam masalah yang muncul akibat tata ruang yang masih sangat perlu diperhatikan.